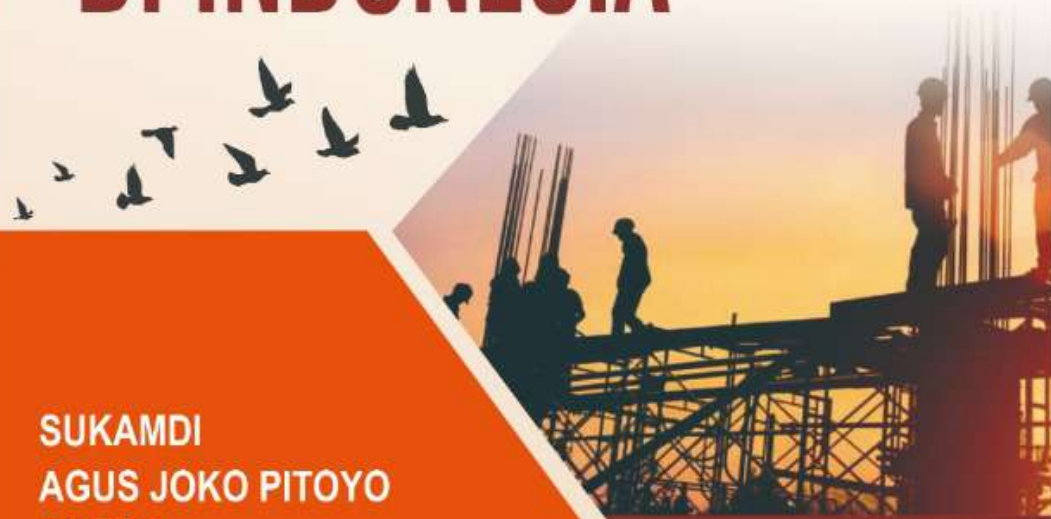


Seiring dengan melemahnya program transmigrasi di Indonesia pada era pasca reformasi, melemah pula kajian tentang migrasi penduduk antardaerah yang juga dikenal dengan migrasi internal. Pada sisi yang lain, perkembangan ekonomi, urbanisasi, dan kemajuan berbagai bidang pembangunan telah mempermudah penduduk dari berbagai daerah untuk saling berinteraksi. Perkembangan transportasi dan teknologi informasi belakangan ini juga turut menjadi penentu suburnya perpindahan penduduk antar daerah. Tidak terbatas migrasi, bentuk-bentuk perpindahan penduduk nonpermanen seperti mobilitas sirkuler, mobilitas pekerja musiman, dan mobilitas ulang alik juga semakin intensif. Fakta ini membuktikan bahwa sejalan dengan pesatnya migrasi internal, pembangunan pun semakin cepat. Seolah tak terpisahkan antara perpindahan penduduk dengan laju pembangunan. Perpindahan penduduk menjadikan urbanisasi semakin cepat dan urbanisasi akan menarik penduduk menuju perkotaan. Pertanyaan besarnya adalah apakah migrasi internal tersebut berlangsung begitu sederhana, bagaimana dampaknya terhadap urbanisasi, bagaimana keterkaitannya dengan dinamika suku bangsa, bagaimana pula nasib perempuan yang terdampak dengan migrasi internal. Berbagai pertanyaan tersebut memang penting untuk dijawab secara jelas dan sistematis. Buku dengan judul **"Migrasi Internal dan Pembangunan di Indonesia"** ini adalah jawabannya. Selamat membaca.

SUKAMDI
AGUS JOKO PITOYO
SUMINI

MIGRASI INTERNAL DAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

MIGRASI INTERNAL DAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA



SUKAMDI
AGUS JOKO PITOYO
SUMINI



PUSTAKA PELAJAR
Penerbit Pustaka Pelajar
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167
Telp. (0274) 381542, Faks. (0274) 383083
e-mail pustakapelajar@yahoo.com
website pustakapelajar.co.id



MIGRASI INTERNAL DAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA



PUSTAKA PELAJAR

MIGRASI INTERNAL DAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

**SUKAMDI
AGUS JOKO PITOYO
SUMINI**

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

MIGRASI INTERNAL DAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA / Sukamdi,
Agus Joko Pitoyo, dan Sumini — Yogyakarta: Pusat Studi
Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, 2022.
X, 198 hlm.; 15,5 x 23 cm.

ISBN: 978-623-236-177-5

1. Migrasi internal	2. Pembangunan	3. Urbanisasi
I. Sukamdi	II. Pitoyo, Agus Joko	III. Judul

Penyunting bahasa: Mita Sari Apituley

Pracetak: Sri Suharti, Ina Florencys

Desain Sampul: Budi Riyanto

Cetakan Pertama, 2022

© 2022 pada Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan
Universitas Gadjah Mada

Gedung Masri Singarimbun Jalan Tevesia, Bulaksumur, DI Yogyakarta

<http://cpps.ugm.ac.id>

Dicetak oleh:

Pustaka Pelajar

JL Celeban Timur UH, III/548, Tahunan, Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55167

<http://pustakapelajar.co.id/>

KATA PENGANTAR

Buku berjudul Migrasi Internal dan Pembangunan di Indonesia ini disusun atas dasar dua hal pokok. *Pertama*, isu migrasi internal dalam tiga dekade terakhir ini tidak banyak didiskusikan terkait dengan menurunnya program transmigrasi di Indonesia. *Kedua*, adalah alasan banyaknya data dan pengalaman PSKK dalam isu migrasi. Sebagai salah satu lembaga penelitian di bawah Universitas Gadjah Mada dengan banyak pengalaman kajian kependudukan utamanya pada bidang mobilitas penduduk, adalah penting bagi PSKK untuk merumuskan kebijakan migrasi internal secara tepat dan komprehensif dari berbagai tinjauan ilmu. Atas dasar itu, buku ini terwujud dan besar harapan menjadi sumber rujukan ilmiah pada isu migrasi.

Buku ini terdiri atas enam bab yang membahas berbagai isu seputar migrasi internal di Indonesia secara terintegrasi dan saling melengkapi. Tulisan diawali dengan kajian teori tentang Konsep, Pendekatan, dan Teori Migrasi. Pada bab dua berisi tentang fakta migrasi internal di Indonesia sejak tahun 1970 sampai 2010. Terdapat berbagai pola arah dan volume migrasi antarprovinsi di Indonesia. Analisis lebih ditekankan pada arus migrasi daerah pengirim dan daerah penerima migran semasa hidup (*life time migration*) dan migran risen (*recent migration*). Pesatnya perluasan perkebunan kelapa sawit saat ini serta industri pengolahan hasil hutan dan pengelolaan pertambangan di Luar Jawa di samping program transmigrasi menyebabkan arus migrasi semakin berkembang. Akan tetapi, bukan tidak berarti arus migrasi dari Luar Jawa ke Jawa berhenti atau berkurang. Perpindahan penduduk dari Luar Jawa ke Jawa tetap terjadi. Perpindahan penduduk menuju Jawa tersebut merupakan dampak dari pembangunan transportasi dan komunikasi, serta berkembangnya bentuk-bentuk mobilitas nonpermanen, yakni mobilitas sirkuler dan ulang-alik sebagai kompromi antardaerah dengan daerah tujuan.

Bab tiga membahas migrasi antarkoridor ekonomi di Indonesia, sebagai suatu konsep yang digunakan dalam sebuah dokumen perencanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pola migrasi internal di Indonesia berdasarkan data SP 1971-2010 bersifat sentris. Meskipun berangsur-angsur Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi menunjukkan penambahan jumlah migran, Jawa senantiasa menjadi kunci dari adanya aktivitas migrasi internal di Indonesia, baik sebagai daerah penyuplai maupun sebagai daerah tujuan. Pada Bab empat tulisan lebih fokus pada migrasi dan urbanisasi. Dijelaskan bahwa tingkat urbanisasi yang tinggi telah menimbulkan permasalahan ekonomi perkotaan, yaitu tingginya tingkat pengangguran. Meningkatnya pengangguran ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor formal tidak mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja sehingga urbanisasi dengan sendirinya mendorong pertumbuhan sektor informal.

Bab lima lebih banyak menyoroti dinamika migrasi suku bangsa di Indonesia. Migrasi tidak sekedar perpindahan penduduk, tetapi merupakan interaksi budaya antarpenduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu lingkungan budaya tertentu ke lingkungan budaya baru. Pada dasarnya mereka membawa pengalaman kultural dan berbagai tekanan yang mereka hadapi di daerah asal ke tempat yang baru. Pada kenyataannya, di lingkungan baru, migran mengalami tekanan yang cukup besar dan mendorong mereka untuk mengalami pergulatan kultural antara mempertahankan identitas budaya asal dan (baik secara terpaksa ataupun suka rela) melakukan perubahan-perubahan identitas budaya, untuk kemudian berusaha memiliki elemen-elemen baru kebudayaan, sehingga mereka dapat melakukan akulturasi budaya.

Pada bab terakhir yakni bab enam, pembahasan fokus pada migrasi perempuan. Disebutkan bahwa perempuan cenderung statis dibandingkan dengan laki-laki. Berdasarkan data Sensus Penduduk 1970 sampai 2010, dalam arus migrasi seumur hidup, migran laki-laki lebih

banyak daripada perempuan meskipun migran perempuan juga terus mengalami peningkatan. Apabila dilihat dari daerah tujuan, migrasi internal perdesaan ke perkotaan masih didominasi laki-laki meskipun migran perempuan dari desa ke kota juga tetap meningkat.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan buku ini terwujud. Kami menyadari bahwa buku ini belum sepenuhnya bisa mewadahi semua aspek dalam bidang migrasi internal. Masih banyak kekurangan dalam buku ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk penyempurnaan buku ini. Namun demikian, buku ini diharapkan dapat ikut memberikan sumbangsih sebagai rujukan dalam kajian mobilitas penduduk di Indonesia.

Yogyakarta, Juni 2017

Sukamdi
Agus Joko Pitoyo
Sumini

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR_____v

DAFTAR ISI_____ix

BAB 1

KONSEP, PENDEKATAN, DAN TEORI MIGRASI_____1

BAB 2

POLA DAN ARAH MIGRASI ANTARPROVINSI_____31

BAB 3

MIGRASI RISEN ANTAR PULAU_____63

BAB 4

PERKEMBANGAN MIGRASI DAN URBANISASI_____89

BAB 5

PERMASALAHAN AKULTURASI DALAM MIGRASI SUKU

BANGSA_____133

BAB 6

TREN DAN FAKTOR PENDORONG MIGRASI INTERNAL

PENDUDUK PEREMPUAN_____177

BAB 5

PERMASALAHAN AKULTURASI DALAM MIGRASI SUKU BANGSA

Setiadi

5.1 Pengantar

Analisis tentang migrasi internal merupakan hal yang sangat penting (King dan Skeldon, 2010: 1619). Menurut pandangan kedua ahli, kajian tentang migrasi internal dan internasional merupakan sebuah oposisi binari dalam kajian migrasi sebagaimana kajian tentang isu migrasi sukarela atau terpaksa, temporer atau permanen, yang memiliki kerangka konseptual, pendekatan, teori, dan paradigma berbeda, tetapi selalu memberikan pembahasan atas pasangannya. Dalam konteks ini, migrasi merupakan sebuah fenomena proses perubahan penduduk, sekaligus juga sebuah proses sosial, ekonomi, dan politik. Dari sisi lain, migrasi etnis tertentu ke wilayah tertentu mengagendakan sejumlah permasalahan, dan salah satunya adalah masalah akulturasi antara penduduk pendatang (etnis pendatang) dan penduduk asli. Isu latar belakang etnis migran menjadi penting dalam analisis migrasi internal di Indonesia.

Sejak dipublikasikannya data jumlah penduduk berdasarkan identitas suku bangsa pada sensus penduduk tahun 2000, publikasi dan pemikiran tentang suku bangsa dalam pembahasan aspek demografis dan kaitannya dengan isu etnisitas berkembang pesat dan terbuka. Setidaknya ada dua karya penting terkait dengan itu, yakni tulisan Suryadinata, Arifin, dan Ananta (2003), serta Tirtosudarmo (2015). Tulisan pertama menginspirasi karya-karya demografi formal dalam upaya menjelaskan aspek kuantitatif data kesukubangsaan dalam sensus tersebut. Sebagaimana diungkapkan Ananta (2013), salah satu pionir pemetaan penduduk berdasarkan suku bangsa, karya tersebut seakan memecah tabu dalam politik kependudukan, khususnya terkait

dengan data kesukuan dan analisisnya. Pasca terbitnya buku pionir tersebut muncul kajian-kajian mikro yang berusaha menganalisis kaitan aspek kuantitas penduduk secara kesukuan dengan berbagai aspek kehidupan di suatu wilayah. Sebagai contoh adalah kajian mikro Ananta, Arifin, dan Bakhtiar terkait dengan penduduk etnis Cina di Indonesia serta etnis minoritas lainnya, seperti India dan Arab di Provinsi Kepulauan Riau. Merujuk pada Ananta (2013), data sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan kompleksitas yang cukup tinggi. Data tentang etnisitas dalam sensus memang cukup rinci, namun hal ini menghadirkan kompleksitas tertentu karena banyaknya kategori etnis yang muncul dalam sensus ini. Ada 1.331 kategori etnis, subetnis, dan sub-subetnis. Tentu saja kondisi ini akan memberikan tantangan tersendiri dalam upaya lebih lanjut untuk melihat keterkaitan antara migrasi internal dengan etnis di Indonesia. Namun tulisan Ananta (2013) secara sangat komprehensif telah menguraikan berbagai aspek, seperti alasan studi aspek etnisitas dalam kajian demografi yang dikaitkan dengan isu transisi demografi ketiga, ketersediaan data, konsep etnisitas, pengukuran kelompok etnis, dinamika (kuantitatif) kelompok etnis, estimasi jumlah etnis, distribusi yang tidak seimbang, pola dinamika kelompok etnis, etnis, dan agama, dll. Kemudian dalam tulisan kedua, Tirtosudarmo (2015) lebih memfokuskan upaya melihat aspek sosiopolitik dan politik demografi dari fenomena migrasi dari komposisi penduduk berdasarkan kesukubangsaan. Walaupun karya penulis ini merupakan kumpulan perjalanan ilmiah selama puluhan tahun, karya ini memperoleh momentum untuk melengkapi penjelasan-penjelasan yang lebih detail terkait data sensus 2000 dan 2010. Dua karya ini pada dasarnya sangat cukup untuk memahami dinamika kesukubangsaan dan kependudukan, baik pada aras makro maupun mikro.

Akan tetapi, ada celah yang perlu diisi dari dua karya tersebut, yakni penjelasan sebenarnya tentang dinamika yang menyertai proses-proses migrasi internal etnis di Indonesia dan kejadian yang terjadi di

daerah-daerah tujuan migrasi. Hal ini mengingat proses migrasi internal didasari oleh alasan yang cukup beragam, seperti kemungkinan dilakukan secara sukarela, terpaksa, bersifat temporer, permanen, migrasi individu, dan keluarga. Di samping itu, juga ada berbagai alasan sosial ekonomi yang mendorong seseorang terpaksa pindah (migrasi) dari satu wilayah ke wilayah lain. Sebagai contoh adalah yang dikaji oleh Hugo. Dalam kajian itu, Hugo (2006) menyatakan bahwa perspektif sejarah merupakan hal yang penting dalam pemahaman tentang migrasi terpaksa kontemporer di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa banyak mobilitas penduduk kontemporer, baik dipaksa maupun tidak terpaksa, memiliki sejarah tertentu. Misalnya, urbanisasi di Indonesia yang berlangsung dalam dekade pasca kemerdekaan adalah suatu bentuk berjalannya mekanisme migrasi terpaksa¹. Dalam konteks Indonesia, migrasi terpaksa menciptakan keterkaitan rantai migrasi antara daerah asal dengan daerah tujuan yang membentuk jaringan baru dengan migrasi tidak terpaksa. Selanjutnya faktor kesenjangan ekonomi menjadi pemicu proses migrasi. Azca (2006) mencatat bahwa isu migrasi terpaksa dapat dilihat dari dua sisi, yakni pertama, migrasi sebagai konsekuensi dan penyebab kekerasan sosial yang mengindikasikan tidak adanya keamanan sosial serta kedua, migrasi sebagai sebab dari kekerasan sosial (baru) dan sebagai sumber kekerasan sosial juga ketidakamanan sosial. Migrasi memberikan dampak tertentu dalam kehidupan rumah tangga, termasuk struktur dan komposisi, pola kepemimpinan dalam keluarga, pernikahan dan perceraian, hubungan antar- dan intrakeluarga, pola pengasuhan anak, situasi ekonomi keluarga, peran dan status perempuan, serta relasi kekuasaan dalam keluarga (Hugo, 2002).

¹ Migrasi terpaksa mengadopsi the definition of 'forced migration' promoted by the International Association for the Study of Forced Migration (IASFM) which describes it as 'a general term that refers to the movements of refugees and internally displaced people (those displaced by conflicts) as well as people displaced by natural or environmental disasters, chemical or nuclear disasters, famine, or development projects (<http://www.forcedmigration.org/about/whatisfm>). Download, 10012017. 07.15 PM.

Dampak dari dinamika komposisi penduduk berdasarkan etnis Indonesia yang tidak dikelola dengan baik adalah munculnya permasalahan sosial dan kemanusiaan di berbagai daerah. Konflik sosial berbasis agama dan ekonomi yang berbaur dengan euforia otonomi daerah dan pemahaman tentang demokrasi yang masih lemah semakin menyebabkan permasalahan kependudukan dan etnisitas tidak tertangani dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya data dari media massa, seperti *Kompas* yang mencatat jumlah kasus kekerasan di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Sepintas kekerasan tampak tidak ada kaitan dengan masalah kependudukan. Namun demikian, seandainya dicermati, eskalasi konflik sangat terkait dengan aspek kependudukan, khususnya isu etnisitas. Merujuk pada data *Kompas*, disebutkan bahwa berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri, pada 2012 kasus radikalisme meningkat hampir 80 persen dari tahun sebelumnya. Kemendagri mencatat peningkatan paham radikalisme tertinggi terjadi pada 2012 dengan telah terjadinya 128 konflik di Indonesia akibat paham radikalisme. Sementara itu, pada 2010 tercatat 93 konflik dan pada 2011 sebanyak 77 konflik (*Kompas*, Maret 2013). Bukti lain terkait pentingnya memahami aspek etnisitas adalah fakta bahwa lima kasus kekerasan besar di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari isu etnis. Kajian Wahid Institut mungkin dapat digunakan untuk cermin betapa isu kekerasan sangat dekat dengan masalah kependudukan. Survei menemukan sejumlah data yang cukup mengkhawatirkan. Dari total 1.520 responden sebanyak 59,9 persen memiliki kelompok yang dibenci. Kelompok yang dibenci meliputi mereka yang berlatarbelakang agama nonmuslim, kelompok tionghoa, komunis, dan selainnya. Dari jumlah 59,9 persen itu, sebanyak 92,2 persen tak setuju bila anggota kelompok yang mereka benci menjadi pejabat pemerintah di Indonesia. Sebanyak 82,4 persennya bahkan tak rela anggota kelompok yang dibenci itu menjadi tetangga mereka². Penelitian terhadap siswa

² Survei Wahid Foundation: Indonesia Masih Rawan Intoleransi dan Radikalisme. Senin, 1 Agustus 2016 | 13:36 WIB

menunjukkan 84,8 persen siswa dan 76,2 persen guru setuju dengan penerapan syariat Islam. Sebanyak 52,3 persen siswa setuju dengan kekerasan untuk solidaritas agama, 14,2 persen membenarkan serangan bom.³ Fenomena ini tentu saja sangat mengkhawatirkan dalam konteks relasi antar etnis di Indonesia.

Lingkaran Survei Indonesia (*www.liputan6.com*, 2012) menunjukkan lima fakta terburuk dari lima kasus kekerasan besar tersebut dilihat dari jumlah korban, lamanya konflik, luas konflik, kerugian materi, dan frekuensi berita. Dari kasus konflik Maluku dan Maluku Utara, tercatat 8.000 sampai 9.000 korban meninggal dunia dan 700.000 warga mengungsi. Dengan lama konflik yang mencapai empat tahun: dari 1999 sampai 2002, konflik ini mencakup luasan sampai tingkat provinsi. Kerugian materi akibat konflik tersebut adalah 29.000 rumah terbakar dan 7.046 rumah rusak, serta 45 masjid, 57 gereja, 719 toko, 38 gedung pemerintah, dan 4 bank hancur. Konflik ini juga menjadi pemberitaan dengan frekuensi sebanyak 147.000 entri di Google Search dengan kata kunci "kerusuhan Ambon". Sementara itu, dalam konflik Dayak versus Madura selama 10 hari pada 2001, terdapat 469 korban meninggal dunia dan 108.000 warga mengungsi. Cakupan konflik juga terjadi dari Kota Sampit yang merupakan ibu kota Kotawaringin Timur itu meluas ke Kota Palangkaraya, Kuala Kapuas, dan Pangkalanbun. Selanjutnya kerugian materi akibat konflik ini terdiri atas 192 rumah dibakar dan 748 rumah rusak serta 16 mobil dan 43 sepeda motor hancur. Konflik ini memiliki 41.000 entri pemberitaan dengan kata kunci "Kerusuhan Sampit" di Google Search.

Kemudian dalam kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, terdapat 1.217 korban meninggal dunia, 85 perempuan diperkosa, dan 70.000 warga mengungsi. Dengan lama konflik selama 3 hari, dari 13 sampai 15 Mei 1998, cakupan konflik ini mencapai se-Provinsi DKI Jakarta. Total keru-

³ Waspada! Penyebaran Radikalisme.

<http://sains.kompas.com/read/2016/06/07/11234931/waspada.radikalisme.teta.p.kritis.saar.mendengar.ceramah>.

gian akibat kerusuhan tersebut sekitar Rp2,5 triliun dengan frekuensi pemberitaan di Google Search lewat kata kunci "Kerusuhan 13-15 Mei 1998" sebanyak 24.700 entri berita. Kasus konflik kekerasan lainnya adalah Ahmadiyah Lombok atau Transito Mataram. Dalam kasus itu ditemukan 9 korban meninggal dunia, 8 luka-luka, 9 mengalami gangguan jiwa, 379 terusir, 9 dipaksa cerai, 3 keguguran, 61 putus sekolah, 45 dipersulit membuat KTP, dan 322 dipaksa keluar dari Ahmadiyah. Konflik ini berlangsung hingga 7 kali penyerangan yang masif antara kurun 1998 sampai 2006 dengan masa delapan tahun warga menjadi pengungsian. Cakupan konflik ini mencapai empat wilayah provinsi, yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram. Kasus itu mengakibatkan 11 tempat ibadah dan 114 rumah rusak, dengan 64,14 hektar tanah terlantar, 25 tempat usaha rusak, serta ratusan harta benda rusak dan dijarah. Dengan kata kunci "Penyerangan Ahmadiyah Lombok" di Google Search, konflik ini mendapatkan 30.800 entri pemberitaan. Kasus konflik kekerasan terakhir adalah yang terjadi di Lampung Selatan. Dalam konflik tersebut, 14 korban meninggal dunia, belasan luka parah, dan 1.700 warga mengungsi dengan lama konflik mencapai 3 hari dari 27 sampai 29 Oktober 2012. Cakupan luas konflik ini meliputi dua kecamatan, yakni Kalianda dan Way Panji. Total kerugian akibat konflik itu mencapai Rp24,88 miliar, serta 532 rumah rusak dan dibakar. Konflik ini memiliki 80.700 entri pemberitaan di Google Search dengan kata kunci "Bentrok Lampung Selatan 28 Oktober 2012". Kondisi dan fakta sejarah ini memberikan sinyal pentingnya memahami berbagai dinamika relasi antaretnis di daerah tujuan migran.

Relasi-Relasi yang Longgar. Relasi-relasi yang longgar antara migran dengan penduduk asli (penduduk di daerah tujuan) sering didasari pada rasa cemburu atas kesenjangan sosial ekonomi antara penduduk pendatang dan penduduk asli. Ada keyakinan dan persepsi salah yang dibangun dan cenderung diyakini sebagai sebuah kebenaran bahwa gara-gara pendatang maka penduduk lokal termarginalisasi.

Namun apakah hal ini sepenuhnya benar? Castles (2008: 10) menunjukkan bahwa migrasi dan pembangunan pada dasarnya adalah dua hal yang berproses secara bersama dan saling interaksi secara intensif. Hal ini berarti apabila ada pembangunan, maka akan ada migrasi. Pembangunan pun biasanya memerlukan migran untuk mengisi berbagai kebutuhan demi semakin mengakselerasikan pembangunan tersebut. Karena keduanya merupakan hal yang saling terkait, maka pada dasarnya akan diperoleh manfaat, baik di daerah asal maupun tujuan. Dalam konteks ini, amat kecil kemungkinan untuk membendung arus migrasi sehingga kebijakan mengurangi arus migrasi merupakan hal yang sulit dipahami. Arus migrasi sebenarnya merupakan kondisi yang wajar dan biasa. Dalam situasi normal ketika tidak ada campur tangan kekuatan dari luar, migrasi sering merupakan proses *self-selected*,⁴ yaitu migran sebagai pengambil risiko yang relatif lebih kuat memiliki spirit perjuangan dibandingkan dengan penduduk setempat atau penduduk daerah tujuan. Kemudian menjadi hal yang tidak mengherankan ketika 'pendatang' lebih mungkin untuk menang dalam kompetisi berhadapan dengan masyarakat lokal di daerah tujuan. Penelitian di Cina (Xing, 2010) menunjukkan hal berikut ini.

"As massive rural residents leave their home countryside for better employment, migration has profound effects on income distributions such as rural-urban income gap and inequalities within rural or urban areas. The nature of the effects depends crucially on who are migrating and their migrating patterns. There are two facts. First, rural residents are not homogeneous, they self-select to migrate or not. Second, there are significant differences between migrants who successfully transformed their hukou status (permanent migrants) and those did not (temporary migrants). The permanent migrants are positively selected from rural population especially in terms of education. As permanent migration

⁴ Cristina Cattaneo. 2007. THE SELF-SELECTION IN THE MIGRATION PROCESS: WHAT CAN WE LEARN? Liuc Papers n. 199, Serie Economica e Impresa, 52, febbraio. <http://www.biblio.liuc.it/liucpap/pdf/199.pdf>. Download 10032016. Chunbing Xing, 2010. Migration, Self-Selection, and Income Distributions: Evidence from Rural and Urban China Beijing Normal University and IZA Discussion Paper No. 4979 May 2010

takes more mass from the upper half of rural income density, both rural income level and inequalities decrease, the urban-rural income ratio increases at the same time. On the contrary, the selection effect of temporary migrants is almost negligible. It does not have obvious effect on rural income level and inequalities”.

Dalam konteks fenomena migrasi di Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang tingkat heterogenitas etnis sangat besar, para migran juga terdiri atas orang-orang dari kelompok etnis dan agama yang beragam. Sementara itu, meningkatnya aliran migran akan mengubah komposisi etnis dan agama dari daerah tujuan. Jika migran menang dalam perebutan kesempatan serta mereka berasal dari latar belakang etnis dan agama yang berbeda, akan muncul berbagai masalah, seperti timbulnya rasa iri secara sosial dan konflik. Fakta menunjukkan banyak konflik etnis dan agama di Indonesia telah diprovokasi oleh ‘orang luar’ dengan memanfaatkan komposisi yang relatif ‘seimbang’ antara etnis dan agama serta kesenjangan sosial dan ekonomi di antara penduduk yang kebetulan berbeda latar belakang (Ananta, 2006). Dengan kondisi ini, pekerjaan penting yang harus diselesaikan adalah membuat sebuah rekayasa sosial bagi terwujudnya relasi antaretnis yang kuat dan didasari rasa saling percaya sehingga memungkinkan adanya integrasi sosial.

Merujuk pada kasus konflik dan kekerasan masa yang ada, kajian terhadap migrasi internal, khususnya berbasis etnis, cukup penting dikaji. Kajian tidak saja pada perubahan-perubahan kuantitas dan persebaran penduduk yang mungkin diakibatkannya, tetapi juga pada fakta bahwa dengan adanya migrasi internal, secara struktural terjadi berbagai perubahan struktur demografi baik dalam aspek ekonomi, politik maupun etnisitas. Relasi antara etnis yang tidak terkelola dengan baik telah menyebabkan berbagai permasalahan disintegrasi dan konflik berkepanjangan, termasuk persebaran berbagai ideologi. Kita harus berkaca pada berbagai kasus pada ranah lokal maupun global. Dalam konteks global, konflik yang berdasarkan mayoritas-minoritas selalu terkait dengan komposisi demografis populasi yang mem-

bawa isu etnisitas, agama, dan ekonomi ke dalam konstelasi politik setelah perang dingin (Tirtosudarmo, 2012). Pengalaman Indonesia menghadapi beberapa konflik di daerah menunjukkan relasi antara etnis lokal dengan pendatang perlu diperhatikan. Konflik anti Cina di Jakarta pada 1998, Dayak dan Madura di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, serta konflik Maluku dan Poso (1998-2001) merupakan sedikit contoh konflik yang melibatkan isu kesukuan (Siddiq, 2005). Goebel (2013: 21-22) mencatat bahwa pasca Orba dan era reformasi, isu etnisitas mengalami peningkatan, tetapi berasosiasi dengan relasi sosial negatif antaretnis seperti konflik. Artinya, relasi antar etnis yang tadinya bersifat komplementer dan kerjasama, pascareformasi relasi bersifat rivalitas dan cenderung negatif. Modal sosial yang telah lama dibangun menjadi berantakan akibat kepentingan-kepentingan sesaat yang ditiupkan seperti semangat kedaerahan. Dikatakan bahwa sejak awal 1990-an, pemanfaatan tanah dan hutan untuk HPH, pertambangan, dan transmigrasi di luar Jawa telah banyak memunculkan relasi yang negatif antara migran dan penduduk asli yang berbasis isu ekonomi dan agama di berbagai tempat, seperti Kalimantan, Sulawesi, Aceh, dan Papua. Namun Sidel (2007: 28) dalam laporannya menyebutkan bahwa tren dalam lima tahun terakhir telah menjurus ke arah positif dan perdamaian, menuju negara yang normal, memunculkan banyak resolusi terhadap berbagai konflik, dan reintegrasi penduduk yang sebelumnya terpaksa pindah akibat konflik sosial dan/atau berbagai diskriminasi. Dengan merujuk beberapa pemikiran ini, kiranya tepat yang disampaikan Graeme Hugo (2006: 85) bahwa pemahaman yang komprehensif atas berbagai fenomena migrasi dan mobilitas akan memberikan keuntungan bagi penyusunan strategi redistribusi penduduk yang tepat untuk menciptakan persamaan distribusi akses sumber daya dan kesejahteraan.

Analisis tentang migrasi internal merupakan hal yang sangat penting (King dan Skeldon, 2010: 1619). Menurut King dan Skeldon, kajian tentang migrasi internal dan internasional merupakan sebuah oposisi

binari dalam kajian migrasi sebagaimana kajian tentang isu migrasi sukarela atau terpaksa, temporer atau permanen, yang memiliki kerangka konseptual, pendekatan, teori, dan paradigma berbeda, tetapi selalu memberikan pembahasan atas pasangannya. Dalam konteks ini, migrasi merupakan sebuah fenomena proses perubahan penduduk serta sebuah proses sosial, ekonomi, politik, kultural, dll. Menurut kedua ahli tersebut, terdapat tiga hal penting terkait dengan isu migrasi ini. Pertama, aspek skala dan jumlah migran. Data migrasi internasional menunjukkan jumlah migran adalah sekitar 3 persen dari total penduduk dunia, tetapi migran internal tidak terdata. Sebagai gambaran, jumlah migran internal di Cina telah setara dengan jumlah migran internasional secara global. Kedua, ada definisi serta batasan yang kabur terkait dengan migrasi internal dan internasional. Dalam hal ini, isu jarak dan perubahan batas administrasi, atau dalam hal ini rezim paspor yang kemudian menentukan. Untuk hal yang kedua ini, kiranya menarik untuk mengkaitkan dengan yang terjadi di Indonesia. Bagaimana menjelaskan para pelintas batas di perbatasan Papua dan Papua New Gini yang berbasis kekerabatan? Pada masyarakat ini, teritorial tidak dibatasi oleh batas administrasi negara. Isu ketiga, merujuk pada kajian Adepoju (1998), migrasi internal dan internasional yang terjadi di Afrika, bahwa “Di Afrika, emigrasi dapat dianggap sebagai hanya perpanjangan dari migrasi internal. Secara konseptual, menurut Adepoju, kedua jenis migrasi berasal dari seperangkat penyebab dasar yang sama: ketidaksetaraan dalam pembangunan, prospek kerja, pendapatan, serta kondisi kehidupan antara dan di dalam negara. Kesenjangan ini tidak diragukan lagi (King dan Skeldon, 2010: 1621). Dalam konteks artikel ini, proses migrasi internal suku bangsa di Indonesia dapat dipahami sebagai sebuah bagian dari proses panjang yang memungkinkan terjadinya migrasi berantai: dari satu wilayah ke wilayah lain, dari wilayah lain ke negara terdekat, dan sebaliknya.

Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana analisis migrasi etnis dapat ditempatkan dalam ranah kajian antropologi demografi? Perta-

nyaan ini menjadi relevan mengingat dinamika fertilitas, mortalitas, dan mobilitas tidak dapat dilepaskan dari aspek sosial budaya. Secara mendasar, peran pendekatan antropologi cukup strategis dalam kajian isu-isu demografi, sebagaimana diungkapkan Bernardi & Hutter (Setiadi, 2014) adalah sebagai berikut.

"... Anthropological demography uses anthropological theory and methods to investigate demographic phenomena. The main theoretical concepts in anthropological demography are culture, gender, institutions, and political economy; its empirical research approach includes a mix of quantitative and qualitative methodologies applied to case studies. Ethnographic fieldwork and participant observation are often central to this approach, as is interpretative reading of primary data and historical material".

Untuk menjawab tantangan ini, artikel ini akan menganalisis fenomena migrasi etnis berdasarkan data sensus penduduk dalam konteks kultural dan dinamika sosial serta kebijakan yang memengaruhi arah dan pola migrasi.

5.2 Beberapa Fenomena Migrasi

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, perkembangan ekonomi Indonesia mengalami berbagai perubahan ke arah modernisasi. Secara struktural, terjadi pergeseran basis perekonomian penduduk dari sektor agraris ke industri dan jasa. Perubahan secara substansial tampak dengan menurunnya angkatan kerja yang bekerja pada sektor pertanian. Apabila pada 1980 sektor pertanian menyerap 55,9 persen tenaga kerja, maka pada 1990 menurun menjadi 49,2 persen (Hugo, 1995). Perubahan ini tidak saja memberikan warna bagi kegiatan perekonomian, tetapi juga berpengaruh terhadap pola komunikasi dan sistem transportasi. Kemudahan transportasi dan komunikasi telah mengubah pola mobilitas penduduk. Dapat dikatakan bahwa keyakinan masyarakat agraris memberikan gambaran sebagai masyarakat yang kurang memiliki tradisi mobilitas, terpatahkan seiring dengan kemajuan transportasi yang mengiringi kemajuan ekonomi. Tirtosudarmo (1997: 294) menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi yang cepat telah meng-

hasilkan perubahan sosial yang kompleks dan ekstensif, termasuk peningkatan migrasi antarprovinsi dan dari desa ke kota.

Sementara itu, mobilitas tenaga kerja telah menjadi gambaran lama dari Indonesia dan peningkatan yang cepat telah menarik perhatian (ILO, 2004). Hal ini tidak hanya karena memiliki skala dan arah mobilitas yang meningkat, tetapi juga begitu banyak memiliki keragaman sehubungan dengan jenis mobilitas dan profil para migran. Data sensus selama 30 tahun terakhir menunjukkan peningkatan migrasi antarprovinsi, terutama untuk migrasi perempuan. Dari proses mobilitas dan migrasi, hampir seperlima dari mobilitas merupakan migrasi kembali. Sebagian besar studi oleh Hugo dan lain-lain mendokumentasikan peningkatan yang stabil dalam migrasi tenaga kerja dan pekerja meninggalkan keluarga mereka di komunitas asal mereka untuk bekerja dalam jangka waktu satu minggu sampai dua tahun (Deshingkar, 2006: 4). Dalam banyak kasus, khususnya perpindahan antarpulau, proses perpindahan merupakan sesuatu yang direncanakan (melalui transmigrasi, pengembangan wilayah pertumbuhan baru, desentralisasi politik) dan ini telah berlangsung cukup lama. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk kembali langsung perpindahan penduduk ke daerah perdesaan atau provinsi yang memiliki kekurangan tenaga kerja, tetapi tidak mendorong migrasi desa-kota karena khawatir adanya tekanan pada daerah perkotaan (Munir, 2002). Dijelaskan bahwa ketidakmerataan telah mendorong munculnya arus migrasi internal yang cukup tinggi. Migrasi internal utamanya terjadi dari perdesaan ke perkotaan, dari sektor pertanian ke jasa konstruksi (Deshingkar, 2006: 4-6). Pada satu sisi, minoritas (termasuk migran) mengalami berbagai kendala untuk terintegrasi dalam lapangan pekerjaan yang ada.

Gambaran persebaran penduduk berdasarkan suku bangsa dari beberapa suku bangsa di Indonesia terlihat pada Tabel 5.1. Data ini menunjukkan bahwa proses persebaran penduduk dengan latar belakang etnis telah tersebar ke seluruh provinsi di Indonesia.

Tabel 5.1 Data Persebaran Penduduk Beberapa Suku Bangsa ke Provinsi Berdasarkan Sensus Penduduk 2010

No	Provinsi	Suku Bangsa									
		Jawa	Sunda	Batak	Minang-kabau	Madura	Bugis	Makassar	Melayu	Papua	Bali
1	Aceh	400.023	10.864	147.295	33.112	866	989	146	22.198	4.418	145
2	Sumatera Utara	4.319.719	35.500	5.785.716	333.241	2.770	4.899	1.695	771.668	11.254	1.162
3	Sumatera Barat	217.096	15.934	222.549	4.219.729	424	656	114	39.629	1.223	192
4	Riau	1.608.268	77.932	691.399	676.948	5.268	107.159	288	1.828.815	3.536	1.031
5	Jambi	893.156	79.203	106.249	163.760	1.184	96.145	165	164.979	123	464
6	Sumatera Selatan	2.037.715	162.877	45.709	64.403	6.532	42.977	939	602.741	3.709	38.552
7	Bengkulu	387.281	52.517	32.972	71.472	2.400	3.687	99	48.331	769	4.323
8	Lampung	4.856.924	728.684	52.311	69.652	6.156	21.054	786	18.175	2.215	104.810
9	Bangka Belitung	101.655	18.958	9.452	4.232	15.429	33.582	321	18.585	567	1.113
10	Kepulauan Riau	417.438	49.419	208.678	162.452	3.050	37.124	2.760	501.061	2.573	1.315
11	DKI Jakarta	3.453.453	1.395.025	326.645	272.018	79.925	68.227	29.444	92.088	14.257	15.181
12	Jawa Barat	5.710.652	30.889.910	467.438	241.169	43.001	34.548	16.581	190.224	36.409	20.832
13	Jawa Tengah	31.560.859	451.271	24.357	8.595	12.920	4.412	924	9.044	4.213	3.487
14	DI Yogyakarta	3.331.355	23.752	9.858	5.152	5.289	3.335	584	15.430	3.567	3.495
15	Jawa Timur	30.019.156	46.233	56.339	6.604	6.520.403	20.753	4.158	11.666	16.100	20.363
16	Banten	1.657.470	2.402.236	139.259	95.845	9.444	15.071	5.557	87.443	7.892	8.034
17	Bali	372.514	11.630	6.489	2.079	29.864	9.287	1.036	22.926	4.229	3.336.065
18	NTB	78.916	4.566	1.574	1.537	2.082	19.965	2.009	1.414	2.360	119.407
19	NTT	54.511	1.887	3.230	2.688	1.612	22.481	2.907	1.235	14.218	6.567

20	Kalimantan Barat	427.333	49.503	26.486	8.083	274.869	137.239	368	814.550	6.035	1.916
21	Kalimantan Tengah	478.434	28.565	12.324	949	42.668	8.040	338	86.322	1.751	7.362
22	Kalimantan Selatan	524.357	24.577	12.408	1.718	53.002	70.460	6.099	3.681	1.085	11.999
23	Kalimantan Timur	1.069.826	55.631	37.145	6.670	46.823	735.624	31.701	6.053	7.837	8.630
24	Sulawesi Utara	70.934	2.904	4.502	691	435	22.021	10.247	322	2.546	14.347
25	Sulawesi Tengah	221.001	15.160	3.228	1.782	2.046	409.709	18.899	1.133	4.969	115.812
26	Sulawesi Selatan	229.074	10.839	4.956	1.745	2.636	3.605.693	2.380.208	2.039	13.840	27.330
27	Sulawesi Tenggara	159.170	25.408	1.952	656	936	496.410	59.301	714	1.668	49.411
28	Gorontalo	35.289	1.300	382	146	225	8.824	1.282	135	423	3.702
29	Sulawesi Barat	56.960	1.800	267	130	317	144.533	25.367	152	528	14.657
30	Maluku	79.340	4.457	1.775	1.385	1.040	25.419	6.414	1.109	3.751	1.616
31	Maluku Utara	42.724	2.592	596	1.345	898	20.634	3.589	222	6.313	245
32	Papua Barat	111.274	7.160	7.186	565	1.161	40.046	17.025	311	387.816	893
33	Papua	233.145	13.376	16.243	2.160	3.681	88.697	41.239	1.004	2.121.436	1.958
	Total	95.217.022	36.701.670	8.466.969	6.462.713	7.179.356	6.359.700	2.672.590	5.365.399	2.693.630	3.946.416

Struktur dan komposisi penduduk menurut kelompok suku bangsa secara rinci disajikan pada Tabel 5.1 tampak bahwa suku Jawa yang berasal dari Pulau Jawa merupakan kelompok suku bangsa yang terbesar dengan populasi sebanyak 95,2 juta jiwa atau sekitar 40,2 persen dari populasi penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean/Boyan, Naga, Nagaring, dan suku-suku lainnya di Pulau Jawa. Suku bangsa terbesar berikutnya secara berturut-turut adalah suku Sunda dengan jumlah sebanyak 36,7 juta jiwa (15,5 persen), suku Batak sebanyak 8,5 juta (3,6 persen), dan suku asal Sulawesi lainnya sebanyak 7,6 juta jiwa (3,2 persen). Suku Batak mencakup suku Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak Dairi, Batak Simalungun, Batak Tapanuli, Batak Toba, dan Dairi. Kemudian kelompok suku asal Sulawesi lainnya merupakan gabungan dari sebanyak 208 jenis suku asal Sulawesi, tetapi tidak termasuk Suku Makassar, Bugis, Minahasa, dan Gorontalo. Komposisi penduduk menurut kelompok suku seperti yang disajikan pada suku-suku asal Papua yang jumlahnya mencapai lebih dari 466 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat, populasinya secara keseluruhan hanya berjumlah sebanyak 2,7 juta jiwa (1,14 persen). Dengan jumlah tersebut, suku-suku asal Papua hanya menduduki peringkat ke-19 dari 31 kelompok suku secara keseluruhan. Kondisi serupa juga terlihat pada suku Dayak yang berasal dari Pulau Kalimantan. Dari Tabel 2 ditunjukkan bahwa suku Dayak yang mencakup sekitar 268 jenis suku mempunyai populasi hanya sebanyak 3 juta jiwa (1,3 persen) pada 2010 dan berada di peringkat 17 dari 31 kelompok suku. Sementara itu, suku Madura yang pada awalnya berasal dari Pulau Madura, pulau kecil di sebelah timur Pulau Jawa, selama beberapa dua dekade terakhir ini menyebar cepat di berbagai wilayah di Indonesia. Selama tahun 2010, populasi suku Madura mencapai sebanyak 7,18 juta jiwa atau sekitar 3,03 persen dari populasi penduduk Indonesia dan menempati peringkat ke-5 dari 31 kelompok suku bangsa. Sementara itu, kelompok suku bangsa di Indonesia yang

populasinya paling sedikit berturut-turut adalah suku Nias dengan jumlah sebanyak 1,04 juta jiwa (0,44 persen), suku Minahasa sebanyak 1,24 juta jiwa (0,52 persen) dan suku Gorontalo sebanyak 1,25 juta jiwa (0,53 persen). Suku Minahasa merupakan gabungan dari suku Bantik, Minahasa, Pasan/Ratahan, Ponosakan, Tombulu, Tonsawang, Tonsea/Tosawang, Tonteboan, Totembuan, dan Toulor (BPS, 2010: 8-9).

Apabila mencermati data makro tersebut, tampaknya masalah persebaran penduduk dari berbagai latar belakang etnis yang berbeda tidak signifikan dalam hal jumlah terhadap total jumlah penduduk suatu provinsi. Namun data-data mikro dari beberapa provinsi menunjukkan hal yang beragam. Mungkin saja secara kuantitas, jumlah migran tersebut tidak terlalu besar. Akan tetapi, permasalahan sosial akan muncul dan telah muncul ketika melihat tempat tinggal para migran tersebut dan cara mereka hidup di daerah tujuan. Berikut ini adalah beberapa kasus kondisi migrasi internal di beberapa wilayah di Indonesia.

Migrasi Internal dalam Konteks Sosial Budaya Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu daerah tujuan migrasi internal di Indonesia. Sebagai contoh adalah dalam konteks migrasi penduduk risen di DIY, data menunjukkan bahwa migrasi risen masuk Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2000 tercatat 170.412 orang atau 5,97 persen dari total penduduk D.I. Yogyakarta. Sebagai perbandingan, data tahun 1990 memperlihatkan migrasi risen masuk D.I. Yogyakarta sebesar 161.740 orang atau bertambah sekitar sepuluh ribu orang. Secara lebih rinci, data menunjukkan bahwa migrasi risen masuk di D.I. Yogyakarta tahun 2000 paling banyak berada di Kabupaten Sleman, yaitu 70.143 orang atau 40,7 persen dari total migrasi risen masuk D.I. Yogyakarta. Kemudian lokasi migrasi risen selanjutnya adalah Kota Yogyakarta dengan 48.986 orang (28,4 persen) dan Kabupaten Bantul sebanyak 24.524 orang (14,2 persen), sedangkan di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul migrasi risen masuk masing-ma-

sing hanya sekitar 8 persen dari total migrasi risen masuk D.I. Yogyakarta. Arus migrasi risen masuk sebagian besar berasal dari provinsi di Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta sebanyak 27.187 orang (15,8 persen) disusul Jawa Barat dan Jawa Timur masing-masing 26.307 orang (15,2 persen) dan 17.395 orang (10,1 persen). Dari luar Pulau Jawa migrasi risen masuk ke D.I. Yogyakarta, terutama adalah dari Pulau Sumatera (13,9 persen), Kalimantan (6,1 persen), dan pulau lainnya kurang dari 2 persen (BKKBN, 2013).

Siapakah para migran risen ini? Sebagai wilayah dengan stereotype Indonesia mini, tentu saja latar belakang migran di daerah Yogyakarta sangat beragam dilihat dari latar belakang kesukubangsaan. Salah satu suku bangsa yang ada adalah suku Banjar. Secara sosial, dalam kehidupan masyarakat ini, mendengar wacana '*urang* Banjar pergi *madam*' bukanlah hal yang aneh. *Madam* dalam bahasa Banjar memiliki arti merantau dalam bahasa Indonesia. Naim (1979: 2-3) mengatakan bahwa merantau adalah sebuah kata kerja yang berarti "pergi ke rantau". Dalam kata lain, merantau dapat juga berarti migrasi. Secara sosiologis, istilah ini setidaknya mengandung enam unsur pokok: (1) meninggalkan kampung halaman, (2) dengan kemauan sendiri, (3) untuk jangka waktu yang lama atau tidak, (4) dengan tujuan mencari penghidupan, menuntut ilmu atau mencari pengalaman; (5) biasanya dengan maksud kembali pulang, dan (6) merantau ialah lembaga sosial yang membudaya (Setiadi, 2014).

Kuatnya budaya *madam* dalam masyarakat Banjar dapat dilacak dari data persentasi "Intensitas Migrasi Suku Bangsa Indonesia" berdasarkan sensus penduduk tahun 1930. Data tersebut menunjukkan bahwa suku Banjar berada pada urutan ketiga setelah Bawean dan Batak. Dengan jumlah seluruh penduduk 944.235 saat itu, 14,2 persen darinya berada di luar wilayahnya sendiri, yakni 134.393 jiwa (Naim, 1979:52). Sementara itu, menurut data BPS 2010, jumlah penduduk yang tinggal di daerah Kalimantan Selatan berjumlah 3.626.119 jiwa dengan rincian 1.834.928 laki-laki dan 1.791.191 perempuan. Itu pun

hanya berdasarkan kategori jenis kelamin dan suku bangsa, yang masih menggabungkan beragam etnis yang tinggal di Kalimantan Selatan. Sementara itu, jika dilihat dari jumlah dan persentase penduduk menurut kelompok suku bangsa, etnis Banjar menempati urutan ke-13 sebagai etnis terbanyak di Indonesia dengan jumlah 4.127.124 jiwa. Sebanyak 2.686.627 tinggal di daerah Kalimantan Selatan dan sisanya menyebar di berbagai daerah di Indonesia. Jika kembali dihitung, ternyata ada 1.440.497 jiwa etnis Banjar yang berada di perantauan dan ini tentu saja sebuah merupakan persentasi angka yang sangat besar.

Banjar sebagai etnis pendatang terkadang memunculkan sebuah kekhawatiran, seperti kemungkinan lahirnya konflik dan gesekan antara etnis Banjar dengan etnis setempat (Jawa). Namun sejauh ini, belum ditemukan konflik yang terjadi antara *bubuhan* Banjar dengan warga sekitar ataupun etnis lain. Nilai yang diajarkan oleh Islam barangkali menjadi modal yang dibawa oleh *urang* Banjar ketika pergi *madam*. Hal seperti ini juga dapat dilihat dari pepatah yang sering diusung masyarakat Banjar ketika merantau: *badiri sadang, baduduk sadang* (berdiri cocok, duduk pun sesuai), yang bermakna seseorang yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Dengan kata lain, ke mana pun seorang Banjar pergi, ia dapat beradaptasi dengan kondisi dan situasi lingkungan setempat. Dengan itu pula, warga setempat akan merasa senang dan hormat kepadanya (Setiawati, 1999: 70).

Nilai-nilai panutan tersebut merupakan pengikat relasi antara *bubuhan* Banjar dengan etnis lain. *Bubuhan* Banjar yang berada di Yogyakarta memiliki pola permukiman yang membaaur sehingga tidak memunculkan citra etnis yang eksklusif. Ada pula *urang* Banjar yang menikah dengan etnis setempat dan menjadi bagian dari organisasi sosial di tempat tinggalnya sehingga muncul istilah "Jarwo (Banjar-Jowo)" untuk menggambarkan pertemuan dua etnis ini. Begitu juga di Masjid Quwwatul Islam, sebuah masjid yang identik dengan komunitas Banjar dan terletak di sebelah utara Hotel Melia Purosani, *bubuhan*

Banjar juga melibatkan warga sekitar dalam kepengurusannya. Sementara itu, dalam keseharian, kehidupan Jarwo tidak berbeda dengan masyarakat lokal karena mereka bergaul dengan masyarakat sekitar tempat mereka tinggal. Dari hal bahasa, mereka sangat mahir menggunakan bahasa Jawa dan perilaku mereka juga tidak berbeda “Orang Banjar di Jawa (Pasar) lebih halus karena sudah menjadi akulturasi dengan Jawa” (Hakim⁵, 2016).

Bagaimana relasi antaretnis dan bagaimana pandangan etnis mayoritas (Jawa) di Yogyakarta? Merujuk pada pernyataan Juningsih (2015) dalam konteks relasi sosial antara orang Tionghoa dengan orang Jawa dan orang Arab, dikatakan bahwa pada umumnya relasi antar-etnis ini dapat berlangsung dengan baik, tetapi sulit berbaur karena perbedaan agama dan budaya. Sebagian besar relasi sosial di antara mereka didasarkan pada kepentingan ekonomi, keangkuhan, dan fanatisme terhadap budayanya sendiri. Mereka menganggap budayanya lebih unggul daripada budaya yang lain. Hal ini menimbulkan kesenjangan di antara mereka dan kadang kala dapat menyulut timbulnya kerusuhan. Namun harus diakui terdapat sejumlah orang Tionghoa yang melebur ke dalam budaya Jawa agar dapat diterima sebagai bagian dari masyarakat Jawa. Sering kali kita mendengar umpatan atau gerutuan, seperti “dasar *durung njowo*” atau belum menjadi Jawa yang merupakan untuk menunjukkan orang pihak lain masih dianggap *the others*. Belum menjadi Jawa diartikan sebagai belum berbudaya dan beradab (tidak memiliki sikap sopan santun, rendah hati, *tepo sliro*, dll). Masih merujuk tulisan yang sama, seiring dengan perkembangan dunia pendidikan, Kota Yogyakarta dibanjiri oleh penduduk dari berbagai daerah di Indonesia untuk belajar. Hal yang ironis adalah sejumlah pemerintah daerah membangun asrama mahasiswa di Yogyakarta untuk membantu penduduk mereka yang sedang belajar di daerah itu,

⁵ Arif Rahman Hakim. 2016. Migrasi dan Identitas Orang Banjar di Yogyakarta. TESIS. Disusun untuk memperoleh gelar S2 pada Program Pascasarjana Antropologi UGM.

seperti Asrama Banuhampu (Sumatra), Asrama Medan, Asrama Kalimantan, dan Asrama Bali. Asrama mahasiswa ini berada di tengah-tengah permukiman penduduk, tetapi mereka jarang sekali berinteraksi dengan penduduk sekitar. Sementara itu, banyak permukiman baru didirikan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi penduduk yang jumlahnya semakin besar. Permukiman baru itu bersifat majemuk serta dihuni oleh berbagai etnis yang berbeda agama dan budaya. Di permukiman baru ini pun, mereka membentuk kelompok-kelompok berdasarkan pada etnis dan agama, seperti kelompok orang Bali, orang Medan, orang Kalimantan, orang Makasar, orang Papua, paguyuban Katolik, kelompok pengajian, dan kelompok iqra (Juningsih, 2015: 7-8). Model permukiman baru ini semakin menggejala di Yogyakarta sehingga semakin mendorong munculnya segregasi sosial antara migran dan penduduk lokal, serta antarkelompok migran. Mungkin suatu saat nanti ilustrasi bahwa Yogyakarta adalah Indonesia mini perlu dipertanyakan. Namun hingga saat ini relasi antaretnis di Yogyakarta tidak pernah memunculkan problem yang mengkhawatirkan. Selama tahun 2011, BPS mencatat hanya ada satu kasus kekerasan dan berkelahian massal berbasis etnis di Yogyakarta (BPS, 2011: 17).

Migrasi Penduduk ke Papua.

Dalam konteks tahun 2000, Papua masih menjadi satu dan jumlah penduduk 2,214 juta jiwa, adalah meningkat drastis jika dibandingkan dengan jumlahnya pada tahun 1990 yang hanya sebesar 1,649 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk papua hanya sebesar 2,95 %. Selain itu pula bertambahnya penduduk papua juga dipicu oleh besarnya migrasi masuk sejumlah 63.829 jiwa berbanding dengan migrasi keluar sebesar 30.155 jiwa.⁶

Papua dan Papua Barat adalah salah satu contoh provinsi hasil pemekaran yang menunjukkan kompleksitas jumlah suku bangsa di

⁶ Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/raudaaspalbuton/resensi-buku-penduduk-indonesia-etnis-dan-agama-dalam-era-perubahan-politik_5535a5e46ea8343c14da4332

dalamnya. Suku-suku yang mendiami di Provinsi Papua dan Papua Barat tercatat sebanyak 206 suku bangsa. Di antara suku-suku itu mendiami wilayah Provinsi Papua Barat tercatat sekitar 67 suku. Seke- dar gambaran, berbagai suku-suku itu adalah Suku Matbat, Biga, Seget, Duriankere, Ma'ya, Maden, Biak, Kawe, Wauyai, Legenyem, Waigeo, Moi, As, Moraid, Abun, Karon Dori, Mpur, Meyah, Hatam, Manikion, Wandamen, Arandai, Moskona, Kaburi, Kais, Mai Brat, Tehit, Kalabra, Konda, Yahadian, Suabo, Puragi, Kokoda, Kemberano, Tanahmerah, Erokwanas, Bedoanas, Arguni, Sekar, Onin, Iha, Baham, Karas, Uruangnirin, Mor, Irarutu, Kuri, Mairasi, Buruai, Kamberau, Kowiai, Semimi, Mer, Kamoro, Ekari, Tunggare, Iresim, Yaur, Yeretuar, Tandia, Roon, Dusner, Meoswar, Ansus, Woi, Pom, dan Mapia (BPS Papua barat, 2010). Pandangan suku bangsa asli Papua pada umumnya terkait migrasi adalah masalah tanah akan menjadi permasalahan yang sering memicu konflik. Dalam budaya Papua, tanah adat adalah satu hal yang sangat penting karena tanah diibaratkan sebagai seorang ibu yang memberikan kehidupan bagi anaknya. Dengan demikian, fungsi tanah terintegrasi ke dalam keseluruhan aktivitas kehidupan. Tanah adat dalam konsep orang Papua adalah hak milik sekaligus hak atas penguasaannya karena tanah merupakan modal awal kehidupan. Dalam tanah terkandung dan terkait berbagai nilai, seperti nilai ekonomi, politis, pertahanan, dan religius magis. Kepemilikan tanah bagi suku Papua bersifat komunal, jadi jika terjadi perpindahan kepemilikan atas tanah, perpindahan itu menjadi urusan komunal atau urusan semua anggota suku, bukan urusan individu semata. Hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat adalah dalam bentuk wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam dan ke luar disebut sebagai hak ulayat (BPS, 2010). Problem relasi antara pendatang dan penduduk asli biasanya merujuk pada permasalahan sumber daya, termasuk tanah. Pada umumnya protes warga masyarakat terhadap pemerintah atau kelompok lain (termasuk para migran) dilandasi kekhawatiran mereka

bahwa sumber daya alam mereka tidak akan dapat memenuhi kebutuhan mereka maupun anak cucu mereka, atau para pendatang memperlakukan sumber daya alam mereka tidak sesuai dengan tradisi penduduk setempat.

Salah satu contoh studi komprehensif tentang Papua adalah disertasi Upton (2009) yang berjudul “The Impact of Migration on the People of Papua, Indonesia a Historical Demographic Analysis”. Secara komprehensif, fenomena migrasi dianalisis dalam disertasi ini menggunakan konteks dinamika aspek sosial, ekonomi, politik lokal, dan beberapa isu lain. Berikut ini adalah beberapa hal menarik yang penulis sitasi dari disertasi ini. Merujuk pada kondisi tahun 1971, dapat dilihat bahwa jumlah terbesar migran di Papua adalah mereka yang sebelumnya tinggal di Maluku. Ada proporsi yang cukup besar migran jangka panjang yakni dari Maluku dan Sulawesi Tenggara, dengan 10,5 persen dan 17,1 persen dari migran tersebut masing-masing tinggal di Papua selama lebih dari 10 tahun. Ada juga sejumlah besar migran yang berasal dari propinsi di Pulau Jawa (46%). Data ini juga membagi migran berdasarkan jenis kelamin dan tampak bahwa hampir dua pertiga dari jumlah migran adalah laki-laki (64 persen).

Tabel 5.2 Penduduk Papua berdasarkan Asal Provinsi dan Lama Tinggal di Papua, Sensus Penduduk 1971

Provinsi Tempat Asal	Lama Tinggal di Papua				Total
	0-4	5-9	10+	Not Stated	
Maluku	5.745	2.502	998	299	9.544
Jakarta	3.516	2.039	215	83	5.853
South Sulawesi	3.896	702	264	206	5.068
West Java	2.776	1.221	97	26	4.120
Central Java	2.759	865	47	114	3.785
East Java	2.024	515	60	25	2.624
North Sulawesi	564	434	37	13	1.048

Provinsi Tempat Asal	Lama Tinggal di Papua				Total
	0-4	5-9	10+	Not Stated	
Southeast Sulawesi	668	79	154	0	901
North Sumatra	566	133	0	42	741
Yogyakarta	520	205	0	3	728
Other	1.820	462	400	157	2.839
Total	24.854	9.157	2.272	968	37.251

Sumber: Upton (2009: 295)

Data Tabel 5.2 juga menunjukkan populasi dengan tempat kelahiran. Sebagian besar migran hanya berasal dari beberapa daerah antara lain Maluku, provinsi-provinsi di Jawa, serta provinsi di Sulawesi dan Sumatera Utara. Sementara itu, migrasi ke daerah perkotaan telah memiliki dampak besar pada komposisi demografis kota-kota Papua. Beberapa faktor yang mendorong meningkatkan jumlah migran di Papua secara historis dapat dirunut sebagai berikut. Transmigran pertama ke Provinsi Papua tiba pada 1964 sebanyak 27 keluarga yang menetap di Kumbe, Merauke dan Sembilan keluarga menetap di Dosai, Jayapura. Sampai tahun 1996 program transmigrasi ini telah menetapkan 288.446 jiwa transmigran di provinsi Papua. Jumlah transmigran mengalami peningkatan sejak tahun 1970-an, yaitu dari 300 KK pada 1980 kemudian meningkat menjadi 11.573 KK. Sebagian besar transmigran tersebut tersebar di tiga kabupaten: Jayapura (3.651), Sorong (3.778), dan Merauke (2.165). Jumlah peserta program transmigrasi secara nasional telah mengalami peningkatan sejak tahun 1980. Selama Repelita III (1979-1983), 300.000 keluarga telah dipindahkan dari Jawa, Madura, Bali, dan Lombok ke luar pulau-pulau masing-masing, sedangkan sebanyak 65.000 keluarga menjadi transmigran lokal di provinsi tempat tinggal mereka.

Dalam catatan Dominggus Mampioer (2012),⁷ proses migrasi terencana telah terjadi sejak 1902, yakni ketika untuk pertama kali Pemerintah Belanda mendatangkan orang-orang Jawa ke Merauke. Tahun 1908 didatangkan lagi masyarakat dari Jawa yang bermukim di Kuprik. Bersamaan dengan itu juga, warga dari Pulau Rote bermigrasi menuju Merauke dan tinggal di Kampung Timor, Merauke. Pada 1910 Belanda kembali mendatangkan masyarakat Jawa dan memukimkan mereka di Spadem dan Mopah Lama. Pada 1943 Pemerintah Belanda terus berupaya mendatangkan orang-orang Jawa untuk ditempatkan di Merauke. Kegiatan ini memunculkan istilah 'Jamer' (Jawa-Merauke). Dalam artikel yang sama, diuraikan strategi sistematis untuk mendorong migrasi dengan pola transmigrasi. Terkait dengan wilayah Kabupaten Bintuni dan sekitarnya, pola transmigrasi perkebunan dan nelayan menjadi pilihan. Pola nelayan (transmigrasi nelayan) dikembangkan pada 1 UPT (Unitt Pemukiman Transmigrasi) di Wimbro, Distrik Aroba, Kabupaten Bintuni. Kemudian untuk pola Hutan Tanaman Industri (HTI-Trans), pola ini mengembangkan komoditas sagu unggul di Aranday I dan Aranday I, serta beberapa UPT sektor pertanian lainnya.

Pada 1990 jumlah transmigran di Papua telah meningkat menjadi 15.851 jiwa. Ada lagi sejumlah besar transmigran menetap di Jayapura (4.169 jiwa) dan Merauke (5.758 jiwa), sedangkan yang menetap di permukiman besar di Manokwari sebesar 3.847 jiwa dan di Fak-Fak 1.222 jiwa. Data ini juga dipecah menurut provinsi transmigran asal dengan mayoritas transmigran tiba dari Jawa (8.259 orang atau 52 persen dari jumlah total). Ada juga sejumlah besar transmigran lokal, dengan 6.580 orang yang digolongkan sebagai anggota lokal, 42 persen dari total pemukim. Sementara itu, antara 1964 dan 2000 tercatat total 220.256 orang telah dibawa ke Provinsi Papua dalam skema transmigrasi. Para migran ini telah menetap di tujuh kabupaten, yaitu Jaya-

⁷ Dominggus Mampioer. Transmigrasi dan Migrasi di tanah Papua. <http://tabloidjubi.com/2012/11/28/transmigrasi-dan-migrasi-di-tanah-papua/on> November 28, 2012.

pura, Sorong, Fak-Fak, Paniai, Merauke, Yapen Waropen, dan Manokwari.⁸

Tabel 5.3 Transmigran ke Papua, 1964-1971

Tahun	Jumlah transmigran
1964	95
1965	-
1966	363
1967	374
1968	287
1969	1.221
1970	1.276
1971/1972	677
Total	4.293

Sumber: Mampioper, 2012.

Pertumbuhan pesat jumlah penduduk Papua berlangsung sejak bergabungnya wilayah ini dengan Indonesia. Hal ini, terutama berlaku dari daerah perkotaan provinsi dengan tingkat pertumbuhan bagi penduduk di daerah-daerah perkotaan yang lebih tinggi daripada di daerah perdesaan. Awalnya migrasi ke wilayah ini merupakan migran jangka pendek oleh kaum laki-laki, tetapi pada 1990 karakteristik migran di provinsi ini tampaknya telah menjadi lebih migrasi dalam jangka panjang, dengan rasio jenis kelamin menunjukkan jumlah yang setara antara penduduk laki-laki dan perempuan (dari kondisi sebelumnya di mana rasio migran laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa ada kemungkinan migran yang datang pada periode awal hanya berusaha mencari pekerjaan, bersifat non-permanen, dan keluarga ditinggal di propinsi asal. Kecenderungan kemudian berubah menjadi pola migrasi keluarga dan memiliki potensi untuk menetap. Hal ini tampak pada data bahwa sampai tahun 2000 dalam komunitas migran rasio jenis kelamin me-

⁸ Deskripsi terkait Transmigrasi dapat juga dilihat pada : <http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id=20080721134337>.

nunjukkan keseimbangan. Bahkan data menunjukkan secara populasi penduduk pendatang sudah lebih seimbang secara kuantitas dengan populasi penduduk asli. Hal ini menguatkan dugaan bahwa pola migrasi telah berubah dari migrasi non-permanen ke pola migrasi permanen. Hal yang dapat disimpulkan dari fenomena ini adalah pada awalnya migrasi ke Papua bersifat individual dan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, tetapi pada dua dasawarsa terakhir, migrasi merupakan migrasi keluarga. Migrasi yang pertama lebih memungkinkan munculnya fenomena mobilitas temporer, sedangkan migrasi keluarga cenderung lebih memungkinkan adanya mobilitas menetap.

Selanjutnya komposisi usia penduduk telah berubah pada 1961-2000 dengan piramida penduduk yang menunjukkan Provinsi Papua telah mengalami transisi demografi dari masyarakat dengan tingkat kelahiran dan kematian tinggi menjadi masyarakat yang lebih stabil dengan tingkat kelahiran dan kematian yang lebih rendah. Data menunjukkan bahwa laki-laki cenderung hidup lebih lama di Papua. Dalam kelompok usia yang lebih muda, terutama di daerah perdesaan, rasio jenis kelamin seimbang terhadap perempuan.

Migrasi di Provinsi Papua juga memberikan dampak pada perubahan komposisi penduduk berdasarkan agama. Data menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk muslim di provinsi ini. Dari 33.083 warga muslim pada 1971 tumbuh menjadi 132.879 pada 1980, 331.229 pada 1990, dan 410.231 pada 2000. Pada titik ini, jumlah warga muslim hampir seperempat dari populasi yang ada di provinsi ini. Dalam periode ini, populasi muslim terkonsentrasi di daerah perkotaan, khususnya kabupaten pesisir yang lebih maju, seperti Jayapura, Sorong, dan Fak-Fak.

Migran memiliki karakteristik jenis pekerjaan yang berbeda dengan penduduk asli. Angka-angka dari tahun 2000 menunjukkan karakteristik yang berbeda dari pekerja pribumi dan non-pribumi di Papua. Industri tertentu didominasi oleh pekerja nonpribumi. Sementara itu, orang-orang nonpribumi hanya 22 persen dari jumlah pekerja

di perdesaan kemudian sebanyak 81 persen dari mereka bekerja di sektor perdagangan, 66 persen di sektor manufaktur, dan 65 persen di sektor transportasi. Di daerah perkotaan, dengan hampir tiga perempatnya berasal dari pekerja yang nonpribumi, 91 persen dari mereka bekerja pekerjaan perdagangan, 82 persen pada proyek transportasi, dan 77 persen pada pekerjaan manufaktur.

Migrasi Suku Bangsa Bugis di Sulawesi Tengah.

Kajian mikro dampak migrasi internal suku bangsa menunjukkan bahwa migran memberikan dampak bagi perubahan pola mata pencaharian penduduk daerah tujuan. Migran Bugis di Sulawesi Tengah sebagai sebuah kelompok etnis memiliki dampak penting terkait pengambilan keputusan penggunaan lahan oleh etnis lokal sebagai pemilik lokasi. Jaringan kuat etnis Bugis memainkan peran penting tidak hanya terkait dengan kepentingan mereka di desa tujuan, tetapi juga terkait dengan transfer pengetahuan dan manajemen pertanian. Kesenjangan hubungan dan interaksi antara penduduk pendatang dan penduduk asli telah berdampak besar bagi produktivitas perkebunan kakao. Dalam hal penguasaan lahan, etnis Bugis mendapatkan tanah pertanian dari petani lokal, atau tergantung pada pola migrasi yang mereka lakukan, dapat saja mereka membeli dari rumah tangga bugis yang lain atau membeli dari pemilik wilayah asli yang biasanya merupakan kelompok yang melakukan pembukaan lahan (Weber, *et.al.*, 2007). Pada kasus wilayah yang sedang berkembang, kejadian di Kabupaten Palalawan dapat digunakan sebagai contoh. Data pada tahun 2005 menunjukkan bahwa kontribusi migrasi terhadap penambahan penduduk mengalami peningkatan yang cukup besar, yakni sebesar 87,08 persen. Hal ini diduga dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan industri, sektor industri kertas RAPP secara nyata memberi kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Palalawan dengan besaran 55,64 persen pada 2004 (Taryono, *et.al.*, 2009: 120).

Migrasi Penduduk melalui Transmigrasi di Aceh.

Deskripsi pada bagian ini mendasarkan pada sebuah laporan yang disusun Depdikbud (1982). Laporan ini menunjukkan bahwa salah satu program pemerintah yang berpengaruh cukup signifikan bagi persebaran penduduk berbasis etnis adalah program transmigrasi. Penelusuran data-data sejarah transmigrasi menunjukkan besarnya jumlah pemindahan orang Jawa ke Aceh dalam hubungan dengan program kolonisasi yang dimulai ketika orang Belanda atau Eropa lainnya membuka perkebunan karet, kelapa sawit, dan damar. Pembukaan perkebunan itu diperkirakan telah dimulai sejak dasawarsa kedua abad ke-20 ini. Pada mulanya mereka tinggal di perkebunan, seperti di daerah Kuala Simpang (Aceh Timur), di Bandar Janarata (Aceh Tengah), serta di Semayam dan Seunagan (Aceh Barat). Di antara mereka, ada yang langsung didatangkan dari Pulau Jawa, tetapi ada pula yang didatangkan dari perkebunan karet dan tembakau di daerah Sumatera Utara. Mereka merupakan tenaga buruh yang terikat dengan kontrak kerja untuk jangka waktu lebih kurang tiga tahun. Namun kebanyakan mereka terpaksa memperpanjang kontraknya karena biaya untuk pulang dihabiskan di bandar perjudian (Depdikbud, 1982). Selanjutnya dijelaskan bahwa pada permulaan 1960-an Pemerintah Daerah Istimewa Aceh mulai memikirkan kemungkinan penempatan transmigran. Untuk itu, telah dirumuskan semacam kebijakan yang berintikan pada tiga persoalan. Pertama, untuk mengisi kekurangan penduduk dan yang diutamakan adalah penempatan transmigrasi lokal yang memberikan layanan yang sama dengan transmigrasi umum (antarpulau/ antardaerah). Kedua, pengurusan dan penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada perbaikan tingkat hidup yang layak dan pembangunan daerah. Pada 1962 pemerintah mendatangkan 100 keluarga transmigran untuk ditempatkan di Proyek Transmigrasi Biang Peututek – Kabupaten Pidie, yang telah mulai dipersiapkan sejak tahun 1960. Proyek transmigrasi ini meliputi areal lebih kurang 500 hektar, yang terletak di kanan-kiri jalan raya Banda Aceh Medan, kira-kira 91 kilometer di se-

belah tenggara Banda Aceh. Akan tetapi, proyek transmigrasi ini tampaknya belum berhasil walaupun tidak dapat dikatakan gagal sama sekali. Keadaan air yang tidak sehat dan adanya penyakit malaria merupakan faktor penyebab utama kegagalan rencana ini. Selain itu, sebagian besar para transmigrasi dituduh ikut terlibat dalam kegiatan politik Partai Komunis Indonesia (PKI).

Data menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 1973, jumlah transmigran yang didatangkan ke Aceh adalah 695 orang. Selanjutnya perpindahan orang Jawa ke Aceh lebih meningkat, terutama sejak daerah ini mulai membangun beberapa proyek yang memerlukan tenaga kerja terlatih. Sebagian orang Jawa yang pindah itu datang langsung dari Pulau Jawa dan sebagian lainnya merupakan orang Jawa yang bermigrasi lokal dari Sumatera Utara. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, Pabrik Gula Cot Girek mendatangkan sejumlah tenaga kerja dan transmigrasi dari Pulau Jawa. Mereka terikat suatu perjanjian kerja untuk jangka waktu lima tahun. Selama tahun anggaran 1976/1977, Direktorat Jenderal Transmigrasi telah menetapkan 800 kepala keluarga transmigrasi dengan rincian 300 kepala keluarga (1.417 jiwa) dikirim ke Cot Girek dan 500 kepala keluarga (2.253 jiwa) dikirim ke Bukit Hagu. Selain itu, penentuan lokasi proyek transmigrasi yang baru dilakukan dengan survei, seperti di Aceh Selatan, Aceh Barat, dan Aceh Tengah.

Sementara itu, migrasi spontan terutama dilakukan oleh orang Batak, Minangkabau, dan Cina. Perpindahan orang Batak ke Aceh diperkirakan berlangsung sejak dasawarsa kedua abad ke-20, terutama ke Tanah Alas. Pada mulanya mereka pindah secara perorangan, tetapi sejak dua dasawarsa terakhir ini, perpindahan itu berlangsung secara kelompok. Kesuburan tanah dan kekayaan alam merupakan daya tarik utama untuk pindah ke Alas, Singkil, dan Aceh Timur. Mereka meninggalkan kampung halamannya dengan tekad benar-benar untuk bekerja sekuat tenaga di tanah rantau. Semangat *marjajo*, yaitu semangat merantau, dipupuk sejak mereka masih remaja dengan harapan jika salah

satu di antara mereka mengalami kesulitan, mereka akan senantiasa membantu.

Sementara itu, pola migrasi orang Minangkabau lazim dikenal juga dengan sebutan merantau. Bagi mereka, merantau merupakan suatu gejala yang telah melembaga sejak berabad-abad yang lalu. Perpindahan orang Minangkabau ke Aceh dapat digolongkan sebagai pola merantau tipe kedua karena wilayah yang dituju. Dalam laporan ini dijelaskan pula bahwa perantauan dengan maksud berdagang disebut *jak naniaga* (pergi berniaga) atau *bercarok* (pada orang Gayo) dan kalau untuk bersekolah, dikatakan *jak meudagang* (pergi bermagang) atau *menuntut* (mencari ilmu, pada orang Gayo). Sementara itu, perantauan dengan tujuan bertani disebut *jak seumuga* (pergi bertanam) atau *murukah* (membuka tanah pertanian, pada orang Gayo). Sebutan lain lagi untuk perantauan adalah *bungka*. Bagi orang Aceh, perantauan mengandung makna pergi mencari penghidupan ke negeri lain. Perantau berjalan, berlayar, atau mengembara, di sepanjang pesisir sebuah daratan yang dibatasi oleh dua sungai. Pengertian tersebut, terutama lazim digunakan pada masa lampau ketika orang Aceh Besar pergi ke daerah pesisir barat Aceh untuk menanam lada. Ketika itu dikenal adanya rantau barat dan rantau Timur, yang berarti pantai barat dan pantai timur Aceh. Kedua pantai tersebut dapat dikatakan merupakan daerah asing bagi mereka yang datang dari Aceh Besar karena kondisi alamnya yang masih semak belukar dan terletak jauh terpencil dari pusat permukiman penduduk setempat. Oleh karena itu, mereka yang hidup di rantau mengalami bermacam penderitaan, baik karena kesepian maupun karena harus berjuang melawan semak belukar (Depdikbud, 1982:36).

Para perantau membentuk kelompok sesuku bangsa yang biasa disebut paguyuban. Paguyuban berbentuk atau bersifat kesukubangsaan maupun kedaerahan. Paguyuban yang bersifat kesukubangsaan mempunyai anggota yang berasal dari suku bangsa yang sama, misalnya Badan Musyawarah Masyarakat Minang (BM3) dan Putra Jawa

Kelahiran Sumatera (Pujakesuma). Selain berbasis kesukuan, paguyuban berbasis daerah asal yang sama juga dengan mudah ditemukan, misalnya Ikatan Keluarga Labuhan Batu (IKLAB) yang anggotanya berasal dari daerah yang sama. Pada kasus migran suku bangsa Aceh, mereka memiliki organisasi tersendiri, seperti Ikatan Aceh Sepakat, Ikatan Keluarga besar Melayu, Himpunan Keluarga Besar Mandailing atau HIKMA dan Organisasi Masyarakat Nias atau ORANI. Bagi orang Batak, perkumpulannya cenderung berdasarkan ikatan marga, seperti *Persadaan marga Harahap*, *Perpulungan Marga Berutu*, dan *Punguan Marga Panjaitan*.

Gambaran tentang para migran dari berbagai suku bangsa ini hanyalah sedikit dari puluhan, bahkan ratusan pola migrasi etnis yang terjadi di Indonesia. Seperti dalam kasus suku bangsa Minangkabau, Naim (1984) menjelaskan bahwa besarnya migrasi suku bangsa Minangkabau ke Kota Medan pada tahun-tahun permulaan tidak pernah terdata secara pasti. Namun data sensus tahun 1930 menunjukkan angka sebanyak 5.048 jiwa suku bangsa Minangkabau bertempat tinggal di Kota Medan. Dalam jangka waktu lima puluh tahun kemudian, yaitu tahun 1980, terjadi kenaikan menjadi total jumlah penduduk 141.507 jiwa.

5.3 Tinjauan Budaya Atas Fenomena Migrasi Internal

Merujuk pada kasus dan data migrasi etnis sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya perlu menengok pada kerangka konseptual yang digunakan Weber (2007), yakni kerangka konseptual untuk mencermati relasi antara migrasi dan etnisitas. Pendekatan yang digunakan untuk membahas fenomena migrasi etnis di Indonesia ini adalah konsep kebudayaan sebagai sebuah sistem orientasi. Melalui pendekatan ini, sistem orientasi dapat didefinisikan sebagai suatu standar budaya, yakni adanya beragam pengamatan, berpikir, menilai, dan bertindak yang menyebabkan anggota kelompok mengambil tindakan yang khas, jelas, dan wajib. Dalam konteks ini, pandangan budaya para

migran dapat dipahami sebagai sebuah pandangan budaya yang homogen untuk kelompok tertentu. Dalam konteks budaya sebagai sebuah sistem orientasi, belum tentu ada kesamaan budaya yang dimiliki oleh semua orang yang tinggal atau hidup dalam lingkungan sosial yang sama, terlebih kelompok kehidupan ini merupakan kelompok multietnis. Namun perspektif yang digambarkan ini merupakan sebuah potret yang terlalu statis tentang budaya dan mengabaikan dinamika yang mendasari.

Dalam pandangan penulis, analisis terhadap aspek budaya harus ditempatkan dan diarahkan pada pentingnya aspek budaya dan migrasi internal dalam pembentukan sistem orientasi nilai budaya, yang memengaruhi tindakan yang akan dilakukan migran di daerah tujuan serta juga tentu saja tindakan komunitas tujuan dalam konteks relasi antara kelompok migran dan nonmigran. Aspek migrasi dan etnis menjadi faktor penting yang memengaruhi faktor-faktor budaya utama di daerah tujuan sehingga dalam jangka panjang, budaya etnis yang lebih beragam akan mewarnai daerah tersebut. Dalam hal ini, sistem orientasi budaya migran dapat dilihat pada aspek faktor-faktor ekonomi politik serta faktor sosiopolitik dan sosiokultural. Sangat jelas bahwa migrasi etnis di Indonesia dipengaruhi oleh ketiga aspek ini

Dalam konteks arah dan tujuan migrasi, pendekatan untuk menjelaskan pola persebaran migrasi etnis ditempatkan pada analisis kontekstual dengan menempatkan berbagai faktor konteks makro dan mikro ekonomi politik serta faktor sosiopolitik dan sosiokultural (kebijakan negara dan pemerintah daerah), yang dalam analisis terhadap fenomena migrasi internal di Indonesia dapat dibedakan dalam dua tataran, yakni konteks mikro dan makro. Merujuk pada analisis kontekstual, analisis dilihat dalam konteks daerah asal maupun daerah tujuan. Terkait upaya memahami dampak migrasi dalam suatu masyarakat, sangat perlu untuk melakukan analisis kontekstual, yakni terbentuknya perilaku individu oleh adanya setting lingkungan tertentu dari perilaku seorang individu (Findley, 1987: 19 via Saefullah, 1992). Kon-

teks (*setting*) dapat dilihat pada situasi fisik dan sosioekonomi maupun sosiokultural sebuah lokasi penelitian. Secara teoretis, Hugo (1987: 164) melihat berbagai variabel kontekstual yang mungkin berpengaruh terhadap migrasi bagi daerah asal migran. Aspek-aspek kontekstual tersebut, antara lain, adalah kondisi lingkungan alam dan fisik, kesempatan kerja, fasilitas transportasi, struktur ekonomi, tingkat pendidikan, kelembagaan religi, stratifikasi sosial, sistem kekerabatan dan kekeluargaan, solidaritas sosial, status dan peranan perempuan, serta sistem politik. Pemahaman konteks ini cukup penting mengingat aspek kontekstual, terutama aspek kultural, inilah yang mengarahkan segenap perilaku dan keinginan individu, terutama melalui sistem nilai sosiokultural yang berkembang di dalam masyarakat (Setiadi, 2014). Berangkat dari kerangka ini, data dan fenomena migrasi internal secara jelas menunjukkan adanya nilai-nilai budaya tertentu yang digunakan, dibentuk, dan direproduksi bagi kelangsungan hidup para migran. Pembentukan paguyuban, ikatan-ikatan kedaerahan, adaptasi terhadap suku bangsa tempatan, serta penguasaan bahasa lokal dan nilai budaya lokal merupakan beberapa contoh perubahan orientasi budaya para migran. Nilai-nilai tersebut pula yang dapat menjelaskan alasan di balik terjadinya perbenturan antara migran dan nonmigran.

Apa yang dilakukan untuk memahami dinamika perilaku para migran adalah memahami cara migran melakukan reproduksi nilai budaya, yaitu pengayaan nilai budaya yang telah mereka miliki untuk proses adaptasi di daerah tujuan. Pada akhirnya mereka memiliki kapasitas untuk melakukan reorientasi nilai. Memahami proses reproduksi nilai budaya dapat dilihat pada aspek proses reproduksi melalui enkulturasi atau proses belajar sosial (dalam proses ini, lebih sering berwujud transmisi antargenerasi atau antarkelompok sosial). Model ini akan memunculkan dinamika budaya yang relative adaptif terhadap kondisi lingkungan. Proses yang lain adalah melalui mekanisme institusionalisasi yang menghasilkan model hubungan antaraktor yang bersifat hegemoni atau kontra hegemoni. Penggunaan model kedua ini

akan memunculkan pelembagaan nilai-nilai kelompok dan secara kontinu, melalui lembaga, para migran akan mencoba mentransmisikan nilai budaya pada komunitasnya dan menunjukkan eksistensinya terhadap komunitas migran lain.

Hal lain yang dimunculkan adalah pemahaman terhadap sejauh mana reproduksi budaya para migran telah mampu menyatu dengan budaya lokal melalui proses *cultural embedded*. Yang dimaksudkan dengan *cultural embedding* adalah mekanisme dan proses bertahan melalui penyisipan ke dalam inti dari institusi budaya yang dominan (Schwartz, 2006) Dalam pengertian yang lain, alasan terjadinya proses reproduksi kebudayaan tidak lain merupakan sebuah upaya atau proses penegasan identitas kebudayaan yang dilakukan oleh pendatang untuk menegaskan kebudayaan asalnya. Sementara itu, proses reproduksi budaya merupakan proses aktif yang menegaskan keberadaan migran dalam kehidupan sosial sehingga mengharuskan adanya adaptasi bagi kelompok yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Dalam kasus ini, dapat dikatakan bahwa reproduksi budaya migran merupakan penegasan budaya asli ke tempat yang baru. Reproduksi kebudayaan dilatarbelakangi oleh perubahan wilayah tempat tinggal, latar belakang sosial, dan latar belakang kebudayaan yang pada akhirnya akan memberikan warna bagi identitas kelompok dan identitas kesukubangsaan (Abdullah, 2001). Reproduksi budaya ialah bertemunya dua budaya yang berbeda dan saling memengaruhi sehingga timbul kebudayaan baru yang mengandung unsur dua kebudayaan tersebut. Dalam kajian teoretis, Peirre Bourdieu juga mengemukakan pendapatnya tentang reproduksi kebudayaan. Melalui konsepnya tentang habitus dan arena serta hubungan dialektis antara keduanya, Bourdieu mengemukakan analisisnya tentang reproduksi kebudayaan. Habitus adalah 'struktur mental atau kognitif' yang dengannya orang berhubungan dengan dunia sosial. Orang dibekali dengan skema yang terinternalisasi yang mereka gunakan untuk mempersepsi, memahami, mengapresiasi, dan mengevaluasi dunia sosial. Melalui skema

inilah, orang menghasilkan praktik budaya mereka, mempersepsi, dan mengevaluasinya (Bourdieu, 1998: 18).

Berbasiskan berbagai kajian teori sebagaimana telah dijelaskan, fenomena migrasi etnis yang terjadi di Indonesia dapat dipahami dalam konteks terjadinya berbagai perubahan relasi kekuasaan dalam tataran mikro (rumah tangga, keluarga), jaringan sosial keluarga, kekerabatan, pertetanggaan, dan berbagai aspek yang memengaruhi migran. Hal itu sebagaimana yang dikatakan Favell (2008: 708) yang menggunakan pendekatan jaringan kerabat dan pertemanan untuk menjelaskan hal yang sama. Analisis dengan pendekatan budaya migrasi akan memberikan pemahaman mendalam terkait dengan pemikiran yang ada di diri migran, memahami pilihan-pilihan yang ada di daerah asal, pilihan-pilihan melakukan migrasi, ekonomi lokal, tekanan kelompok dan keluarga, serta tentu saja tawaran kesejahteraan di daerah lain. Hal inilah yang selama ini terjadi di daerah-daerah tujuan migran di seluruh Indonesia, sebuah proses dialektika yang terus-menerus terjadi, berkelindan dengan dinamika eksternal masyarakat.

Dalam konteks inilah pentingnya mencermati yang terjadi pada masyarakat Papua, Aceh, Bugis, Minangkabau, dan berbagai suku bangsa lainnya dalam mengontekskan analisis migrasi etnis sebagai sebuah bagian dari proses reproduksi budaya serta mengubah konsepsi dan aspirasi terkait dengan ranah budaya dan pemahaman tentang konsepsi keruangan secara kultural, dan menggunakannya sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya perumusan kebijakan migrasi internal. Secara praktis, migrasi etnis telah memberikan dampak penyebaran aspek-aspek budaya etnis dan memungkinkan munculnya akulturasi budaya dengan beragam dampaknya. Kejadian yang kemudian terjadi antara migran dan penduduk tempatan adalah proses integrasi budaya dan akan berdampak pada integrasi nasional.

5.4 Simpulan

Hal yang terpenting dalam memahami migrasi etnis internal di Indonesia adalah ketika seseorang melakukan migrasi: perpindahan

dari suatu lingkungan budaya tertentu ke lingkungan budaya baru, mereka pada dasarnya membawa pengalaman kultural dan berbagai tekanan yang mereka hadapi di daerah asal ke tempat yang baru. Pada kenyataannya di lingkungan baru, migran mengalami tekanan yang cukup besar dan mendorong mereka untuk mengalami pergulatan kultural antara mempertahankan identitas budaya asal dan (baik secara terpaksa ataupun sukarela) melakukan perubahan-perubahan identitas budaya, untuk kemudian berusaha memiliki elemen-elemen baru kebudayaan sehingga mereka dapat melakukan akulturasi budaya. Permasalahan akan semakin berat dihadapi para migran ketika budaya lama mereka memiliki perbedaan yang cukup kontras dengan kebudayaan mereka sekarang.

Kondisi para migran tersebut selaras dengan sifat dari proses migrasi tersebut. Migrasi adalah proses perubahan sosial ketika seorang individu, sendiri atau ditemani oleh orang lain, karena satu atau lebih alasan, apakah perbaikan ekonomi, pergolakan politik, pendidikan atau keperluan lain, meninggalkan satu wilayah geografis untuk tinggal lama atau bermukim secara permanen di wilayah geografis yang lain. Dalam kajian ini, ditekankan bahwa migrasi merupakan sebuah proses, yang tidak sekadar merupakan proses meninggalkan wilayah geografis, tetapi proses tersebut melibatkan proses melemahnya intensitas hubungan tatap muka dengan komunitas lama serta proses melemahnya intensitas membangun jaringan sosial, yang mencakup juga awal seseorang mengalami rasa kehilangan, dislokasi, alienasi, dan isolasi. Hal-hal tersebut mendorong munculnya proses akulturasi. Hal yang menarik adalah kemampuan seseorang atau sekelompok migran mengelola berbagai faktor di lingkungan dan dikombinasikan dengan tingkat stres, kemampuan untuk mengatasi stres, dan kemampuan untuk beradaptasi sesuai kepribadian seseorang akan berdampak pada kemampuannya untuk hidup berdampingan dengan budaya lain, atau justru akan semakin memiliki rasa terisolasi dan terasing.

Ketika dua nilai budaya bersentuhan akibat migrasi, maka sejum-

lah peristiwa dapat terjadi. Proses akulturasi akan membawa proses tarik-menarik, proses adaptasi, penolakan, dan penerimaan budaya lain. Akulturasi merupakan fenomena yang terjadi ketika kelompok individu dari budaya yang berbeda datang dan melakukan kontak secara kontinu dengan budaya tempatan. Pada tingkat individu dalam hal perilaku, aspek-aspek yang dapat diidentifikasi dan dihubungkan dengan proses akulturasi adalah bahasa, agama, hiburan, makanan, dan kebiasaan lainnya. Pada tataran yang lebih abstrak, termasuk di dalamnya adalah sistem kognitif atau pola pemikiran, pola perilaku, dan sikap.

Banyak faktor yang berperan dalam proses akulturasi, seperti efek trauma pramigrasi, faktor pasca migrasi, misalnya kehilangan peran sosial, kepercayaan, dan sikap; faktor sosiodemografis, seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, dan ekonomi status, serta efek dari orientasi budaya, misalnya asimilasi (menjadi bagian dari budaya mayoritas), pemisahan (menjadi terasing), bikulturalisme (merasa cukup nyaman di kedua budaya) dan marginalisasi (menjadi ditarik atau dicabut dan terisolasi dari kedua budaya), serta aspek penerimaan dari masyarakat daerah tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kompas. 2013. "Aksi Kekerasan di Indonesia Meningkat", http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/15/2004574/Aksi.Keke_rasan.di.Indonesia.Meningkat. Jumat, 15 Maret.
- Ammarell, Gene. 2002. "Bugis Migration and Modes of Adaptation to Local Situations", *Ethnology* Vol. 41 (1). Pp. 51-67.
- Ananta. Aris, Arifin, Evi Nurvidya, Hasbullah, M. Sairi. Handayani, Nur Budi dan Pramono, Agus. 2013. "Changing Ethnic Composition: Indonesia, 2000-2010", http://iussp.org/sites/default/files/event_call_for_papers/IUSSP%20Ethnicity%20Indonesia%2

0Poster%20Section%20G%202708%202013%20revised.pdf.

Diunduh pada 10 Maret 2016.

- Ananta, Aris. 2006. *Abstract*. "Migration and Potential Conflict in Multi-ethnic and Multi-religious Province of Riau Archipelago, Indonesia". International Conference on Population and Development in Asia: Critical Issues for a Sustainable Future 20 – 22 March, Phuket, Thailand.
- Bennett, T. & Silva, E. 2006. "Cultural Capital and Inequality – Policy Issues and Contexts", *Cultural Trends*, 15(2-3): 87-106. http://www.uws.edu.au/centre_for_cultural_research/ccr/people/researchers/prof_tony_bennett.
- Bourdieu, Pierre and Jean-Claude Passeron. 1990. "Foundation of a Theory of Symbolic Violence", *Reproduction n Education, Society and Culture*. Diterjemahkan dari bahasa Perancis oleh Richard Nice dengan Pendahuluan dari Tom Bottomore. Prefice ro rhe Sage Publications London. Thousand Oaks - New Delhi in association with Theory, Culture & Society. Pp: 1-68.
- BPS. 2010. "Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010", http://demografi.bps.go.id/phpfiletree/bahan/kumpulan_tugas_mobilitas_pak_chotib/Kelompok_1/Referensi/BPS_kewarganegaraan_sukubangsa_agama_bahasa_2010.pdf.
- BPS. 2013. "Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka", http://bap.peda.jogjaprov.go.id/assets/uploads/docs/DIY_Dalam_Angka_2013.pdf.
- BPS. 2011. "Statistik Politik dan Keamanan Daerah Istimewa Yogyakarta". http://yogyakarta.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Politik-Dan-Keamanan-Provinsi-Daerah-Istimewa-Yogyakarta-2011--.pdf.
- Castles, Stephen. 2008. "Development and Migration – Migration and Development: What comes first?", *Migration and Development: Future Directions for Research and Policy*. SSRC Migration &

- Development Conference Papers. 28 February – 1 March. New York, NY. <http://essays.ssrc.org/developmentpapers/wp-content/uploads/MigrationDevelopmentSSRCConferencePapers.pdf> . pp: 10-32. Diunduh pada 10 Maret .
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1982. “Pengaruh Migrasi terhadap Perkembangan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh”, dalam Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. Republik Indonesia.
- Deshingkar, Priya. 2006. Internal Migration, Poverty and Development in Asia. Including the Excluded through Partnerships and Improved Governance. From opening remarks by Frank Laczko, Head of Research, International Organisation for Migration, at the IOMSSRC-ESRC Workshop on Migration and Development Within and Across Borders: Concepts, Methods, and Policy Considerations in Internal and International Migration, 17–19 November, 2005, New York
- Favell, Adrian. 2008. “The New Face of East-West Migration in Europe”, *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 34: 5, Pp. 701 — 716. <http://dx.doi.org/10.1080/13691830802105947>.
- Goebel, Zane. 2013. “The Idea of Ethnicity in Indonesia”, Tilburg Paper in Culture Studies. Paper 71. Tilburg University.
- Goldthorpe, John H. 2007. “Cultural Capital: Some Critical Observations”, *Sociologica*, 2. Pp: 1-23.
- Hakim. Arif Rahman. 2016. Migrasi dan Identitas Orang Banjar di Yogyakarta. TESIS. Disusun untuk memperoleh gelar S2 pada Program Pascasarjana Antropologi UGM.
- Hasitschka, Werner; Peter Tschmuck and Tasos Zembylas. 2005. “Cultural Institutions Studies: Investigating the Transformation of Cultural Goods”, *The Journal of Arts Management, Law and Society*, Vol. 35/ Nr.2, pp.147-158.
- Hoppe, Michael and Faust, Heiko. 2004. “Transmigration and Integration in Indonesia Impacts on Resource Use in the Napu Valley,

- Central-Sulawesi”, STORMA Discussion Paper Series Sub-program A on Social and Economic Dynamics in Rain Forest Margins No. 13 (January 2004) Research Project on Stability of Rain Forest Margins (STORMA) Funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft under SFB 552 Participating institutions: Institut Pertanian Bogor, Universitas Tadulako, University of Göttingen, and University of Kassel. <https://www.uni-goettingen.de/de/document/download/.../SDP13.pdf>.
- Hugo, G.J. 1995. “International labor migration and the family: Some observations from Indonesia”, *Asian and Pacific Migration Journal*, Vol. 4, Nos. 23, Pp. 273-301.
- Hugo, Graeme. 2006. “Forced Migration in Indonesia: Historical Perspectives”, *Asian and Pacific Migration Journal*, Vol. 15, No. 1. Pp: 53-91.
- Jaeger, Mads Meier. 2011. *A Dynamic Model of Cultural Reproduction*. Department of Education, Aarhus University, 5 September.
- Jana, Evans Braziel and Mannur, Anita. 2003. “Nation, Migration and Globalization: Point of Contention in Diaspora Studies”, dalam Jana Evans Braziel & Anita Mannur (eds.), *Theorizing Diaspora*. Pp.1. Germany, Blackwell Publishing.
- Juningsih, Lucia. 2015. “Multikulturalisme di Yogyakarta dalam Perspektif Sejarah”, Makalah Seminar Dies ke-22 Fakultas Sastra Pergulatan Multikulturalisme di Yogyakarta dalam Perspektif Bahasa, Sastra, dan Sejarah Program Studi Sejarah Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 27 April.
- King, Russell and Skeldon, Ronald. 2010. “Mind the Gap! Integrating Approaches to Internal and International Migration”, *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 36: 10, 1619 — 1646, First published on 29 June 2010. URL: <http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2010.489380>.
- Kraaykamp, Gerbert dan Koen van Eijck. 2010. The Intergenerational Reproduction of Cultural Capital: A Threefold Perspective. *Social*

Forces, Volume 89, Number 1, September, pp. 209-231

LSI: Ini 5 Kasus Kekerasan Paling Mengerikan di Indonesia. <http://news.liputan6.com/read/473537/lsi-ini-5-kasus-kekerasan-paling-mengerikan-di-indonesia>. Download, 10032016. 08:52 AM.

Mampiooper. Dominggus. 2012. Transmigrasi dan Migrasi di tanah Papua. <http://tabloidjubi.com/2012/11/28/transmigrasi-dan-migrasi-di-tanah-papua/> on November 28, 2012.

Naim, Mochtar. 1984. *Merantau: pola migrasi suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,

Nash, Roy. 1990. Bourdieu on Education and Social and Cultural Reproduction. *British Journal of Sociology of Education*, Vol. 11, No. 4, pp. 431-447 Published by: Taylor & Francis, Ltd. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1392877> Accessed: 15/05/ 2008 00:15

O'Connor. C. M. 2004. Effects of Central Decisions on Local Livelihoods in Indonesia: Potential Synergies between the Programs of Transmigration and Industrial Forest Conversion. *Population and Environment*, Vol. 25, No. 4, March 2004 _ 2004 Human Sciences Press, Inc. Hlm : 319-334.

Patterson. Orlando. 2010. "the Mechanisms of Cultural Reproduction: Explaining rhe Puzzle of Persistence", in Hall. John R, Laura Grindstaff dan Ming-Cheng Lo (ed). *Handbook of Cultural Sociology*. Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RN. Hal : 139-151.

Setiadi. 2014. *Antropologi Migrasi: Sebuah Catatan Awal Pengembangan Perspektif*. Dalam Heddy Shri Ahimsa-Putra (ed).

Setiadi. 2014. *Dinamika Migrasi dan Identitas Budaya: Kajian Antropologi Proses dan Hambatan Akulturasi di Kota Yogyakarta*. Laporan Akhir Penelitian Payung. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Tidak Dipublikasikan.

Schwartz, Shalom H. 2006. "A Theory of Cultural Value Orientations: Explication and Applications. *Comparative Sociology*, Volume 5,

- issue 2-3. Pp: 137-187.
- Siddiq. Irfan. 2005. Ethnic Conflict in Indonesia: Causes and Recommended Measures. Thesis. MASTER OF ARTS IN NATIONAL SECURITY AFFAIRS from the NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL. MONTEREY, CALIFORNIA.
- Sidel. John T. 2007. Indonesia: Minorities, Migrant Workers, Refugees, and The New Citizenship Law. A Writenet Report by commissioned by United Nations High Commissioner for Refugees, Status Determination and Protection Information Section (DIPS).
- Singgih Tri Sulistiyono, "Diaspora dan Proses Formasi Keindonesiaan: Sebuah Pengantar Diskusi" (Makalah dipresentasikan pada Konferensi Nasional Sejarah IX, Jakarta, 5 – 7 Juli 2011), hlm.8;
- Sullivan, Alice. 2002. "Bourdieu and Education: How Useful is Bourdieu's Theory for Researchers?", *The Netherlands 'Journal of Social Sciences - Volume 38 (2)* , pp:144-164.
- Taryono, Rita Yani Iyan, dan Rahmita B. Ningsih. 2009. Studi Tentang Migrasi dan Implikasinya terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Ekonomi Volume 17, Nomor 2 Agustus* . Hlm: 120-131.
- Thomas Faist, "Diaspora and Trans Nasionalism, What kind of dance partner?" dalam Rainer Baubock & Thomas Faist (ed), *Diaspora and Transnationalism, Concept, Theories and Methods* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 9-10;
- Tirtosudarmo, Riwanto. 2015. *On The Politics of Migration: Indonesia and Beyond* . LIPI PRESS. Obor Indonesia, Yayasan.
- Tirtosudarmo. Riwanto. 1997. Economic Development, Migration, and Ethnic Conflict in Indonesia: A Preliminary Observation. *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 12, No. 2, SOUTH-EAST ASIANDIASPORAS (October 1997), pp. 293-328 Published by: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/41056968>. Accessed: 14/12/ 2014 21:14.

- Tirtosudarmo. Riwanto. 2012. Migration, Ethnicity and Conflict in Southeast Asia. *Jurnal Kajian Wilayah* 3(1): 2-23.
- Tzanakis. Michael. 2011. *Critical Review: Bourdieu's Social Reproduction Thesis and The Role of Cultural Capital in Educational Attainment: A Critical Review of Key Empirical Studies Educate~* Vol. 11, No. 1. pp. 76-90. <http://www.educatejournal.org/>.
- Upton, Stuart. 2009. *The impact of migration on the people of Papua, Indonesia A historical demographic analysis*. A thesis submitted to the Faculty of Arts and Social Sciences in fulfilment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy. Department of History and Philosophy University of New South Wales.
- Weber, Robert. et.all., 2007. Migration and ethnicity as cultural impact factors on land use change in the rainforest margins of Central Sulawesi, Indonesia. In. *Tscharntke T, Leuschner C, Zeller M, Guhardja E, Bidin A (eds), The stability of tropical rainforest margins, linking ecological, economic and social constraints of land use and conservation, Springer Verlag Berlin 2007, pp 417-436*.
- Xing, Chunbing.2010. Migration, Self-Selection, and Income Distributions: Evidence from Rural and Urban China Beijing Normal University and IZA Discussion Paper No. 4979 May 2010.
- Yoshida Masanori. 2013. Anthropological Study of Folk Medical Practices in the Multi-ethnic Settings of North Sumatra, Indonesia. *Studies in International relations*. Vol. 34. No. 1. Oktober pp: 97-101.